

SINERGI

BULETIN BPIW

 **KEMENTERIAN PUPR**
BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH

Media Informasi & Komunikasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR



Memadukan Pembangunan Infrastruktur PUPR di Selingkar Wilis

Kawasan Selingkar Wilis di Jawa Timur memiliki potensi ekonomi yang perlu dikembangkan seperti agribisnis dan pariwisata. Untuk itu dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan kawasan tersebut. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 2014 telah melaksanakan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. BPIW juga telah melaksanakan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, salah satunya di Selingkar Wilis, Jawa Timur. BPIW telah melaksanakan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, salah satunya di Selingkar Wilis, Jawa Timur. BPIW telah melaksanakan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, salah satunya di Selingkar Wilis, Jawa Timur.

Berbagai di Provinsi Kabupaten Bangkalan pada 11 Juli 2016 lalu, Bupati Bangkalan telah melakukan pemaduan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, salah satunya di Selingkar Wilis, Jawa Timur. BPIW telah melaksanakan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, salah satunya di Selingkar Wilis, Jawa Timur.





**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH (BPIW) KEMENTERIAN PUPR**

INFRASTRUKTUR PUPR TERPADU UNTUK NEGERI

Gedung BPIW Lantai 1

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210

Email: humasbpiw@gmail.com

Telp. +6221-2751 5804

SINERGI

BULETIN BPIW

Pelindung:

Rido Matari Ichwan

Penasehat:

Firman Hatorangan

Pengarah:

Bobby Prabowo
Iwan Nurwanto
Hadi Sucahyono
Agusta Ersada Sinulingga

Pemimpin Redaksi:

P. Yudiantoro

Redaktur Pelaksana:

Shoviah

Redaksi:

M. Salahudin Rasyidi
Mochammad Tranggono
Hari Suharto Diyaksa
Erwin Adhi Setyadi
Wahyu Hendrastomo
Melva Eryani Marpaung

Editor :

Hendra Djamal

Kontributor:

Mutri Batul Aini
Indira Dwi Kusumatuti
Daris Anugrah
Andhika Prabowo

Diterbitkan oleh:

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
(BPIW) Kementerian PUPR

Alamat Redaksi:

Gedung G, BPIW Lantai 1
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 11210
Email: humasbpiw@gmail.com
humasbpiw@pu.go.id
Website: www.bpiw.pu.go.id
Twitter: @informasiBPIW
Youtube: Layanan informasi BPIW
Facebook: BPIWkementerianPUPR
No. Telp. +6221-2751 5804

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:
humasbpiw@gmail.com

Design : Heri Hito
Kartunis: Aghni Ghofarun Auliya

SALAM REDAKSI

.....

Pembaca yang budiman, Buletin Sinergi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, kini telah memasuki edisi 21. Dalam Sinergi edisi bulan September ini, rubrik Kabar Utama membahas secara mendalam mengenai rencana pengembangan konektivitas di Selingkar Wilis, Jawa Timur.

Sedangkan Laporan Khusus Sinergi kali ini dibahas mengenai upaya untuk mengangkat perekonomian desa melalui program pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).

Dalam rubrik wawancara, kami menghadirkan Anggota DPR RI dari Komisi V, Budi Yuwono. Pada rubrik tersebut dibahas seputar arah rencana dan langkah DPR dalam mendukung perencanaan dari BPIW.

Selain itu, ada informasi mengenai kegiatan BPIW sepanjang bulan September yang disajikan dalam rubrik Kilas BPIW. Ada juga sajian informasi ringan yang menarik seperti rubrik Jalan-Jalan, Tips, Glossary serta Serba-serbi.

Kami berharap apa yang disajikan pada edisi kali ini dapat menambah wawasan pembaca.

Selamat membaca.

04



01 SALAM REDAKSI

02 DAFTAR ISI

03 PERSPEKTIF

Pengembangan Infrastruktur
Konektivitas serta Kawasan Perdesaan

04 KABAR UTAMA

Memadukan Pembangunan Infrastruktur PUPR di Selingkar
Wilis

10 REVIEW

Menyelamatkan Bumi dengan Cara Bijak

11 GLOSSARY

Istilah Tentang Konektifitas

12



12 WAWANCARA

Budi Yuwono: Perencanaan Infrastruktur PUPR Perlu Diper-
tajam

18 TEROPONG MEDIA

Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

32



18



18 KILAS BPIW

Kementerian PUPR Dorong Pemda Implementasikan *New
Urban Agenda*

32 LAPORAN KHUSUS

Mengangkat Perekonomian Desa Melalui Pengembangan
KPPN

36 OPINI

Pengembangan Wilayah Berbasis Teknologi
(Bagian Kedua)

42 JALAN-JALAN

Mengunjungi Keanekaragaman Hayati di Gugusan Kepulauan
Raja Ampat

46 TEKNOLOGI

Bangunan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH)

48 POTRET

RDP Rencana Kerja dan Anggaran 2018

56 TOKOH

H. Muhtarom S.Sos: Tahun 2017, Fokus Penanganan Infra-
struktur pada Jalan dan Pengairan

56



Pengembangan Infrastruktur Konektivitas serta Kawasan Perdesaan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan percepatan pembangunan sistem konektivitas nasional, guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global.

Salah satunya rencana pembangunan konektivitas di kaki bukit Gunung Wilis yang pembangunannya sudah semakin di depan mata. Rencana pembangunan yang menyentuh enam kabupaten di Jawa Timur (Jatim) itu pun, telah mendapat persetujuan dari DPR RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sebagai perwakilan pemerintah pusat serta pemerintah daerah, yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan 6 Pemerintah Kabupaten yang akan tersentuh dalam pembangunan jalan Selingkar Wilis.

Pembangunan jalan Selingkar Wilis tersebut yang akan menyentuh wilayah di Kabupaten Tulungagung, Nganjuk, Trenggalek, Ponorogo, Madiun dan Kabupaten Kediri ini dilakukan dengan tujuan mewujudkan jejaring wisata pegunungan, pantai, panorama alam dan budaya yang bersinergi dengan pengembangan agrobisnis dan industri serta pengolahan bahan mineral untuk membangkitkan daya tumbuh kembang kawasan secara inklusif dan berkelanjutan.

Jalan yang ada di Selingkar Wilis juga sudah ditetapkan sebagai jalan nasional, dan masih perlu ditingkatkan kondisinya agar dapat mengembangkan kawasan itu. Termasuk kawasan perdesaan yang ada di enam kabupaten tersebut.

Terkait pengembangan kawasan perdesaan, BPIW telah memberikan arahan dengan menekankan

dukungan infrastruktur PUPR diprioritaskan sesuai skala kebutuhannya.

Perencanaan pengembangan infrastruktur PUPR di kawasan perdesaan harus berjalan efektif dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Dukungan infrastruktur PUPR juga didorong untuk membuat masyarakat perdesaan semakin mampu meningkatkan taraf hidupnya.

Dukungan Kementerian PUPR untuk pengembangan kawasan perdesaan mulai dari penyusunan dokumen *masterplan* dan *development plan* (MPDP) kawasan KPPN hingga pelaksanaan pembangunan infrastrukturnya.

Adapun dokumen MPDP merupakan dokumen kesepakatan dan acuan bersama para pemangku pembangunan, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, agar pengembangan kawasan perdesaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.^(**)



Memadukan Pembangunan Infrastruktur PUPR di Selingkar Wilis

Kawasan Selingkar Wilis di Jawa Timur, memiliki banyak potensi yang perlu dikembangkan seperti agrobisnis dan pariwisata. Untuk itu dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan kawasan tersebut. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membuat perencanaan pengembangannya melalui pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Tidak hanya itu, BPIW juga menggagas rapat koordinasi rencana tindak lanjut pengembangan Selingkar Wilis. Rapat yang dilakukan di Kota Madiun ini dihadiri 6 kepala daerah dan juga 4 anggota Komisi V DPR RI. Dalam pertemuan itu keterpaduan pun dilakukan untuk mengembangkan infrastruktur PUPR di kawasan tersebut.



Pertemuan BPIW Kementerian PUPR, Kepala Daerah, dan Anggota DPR RI, bahas Selingkar Wilis

Sumber: Dok. PUPR



Pembangunan Anjungan Cerdas Trenggalek.

Sumber: Dok. PUPR

Wilis merupakan nama sebuah gunung yang berada di Provinsi Jawa Timur. Gunung berapi yang memiliki tinggi 2.169 meter di atas permukaan laut ini termasuk dalam wilayah 6 kabupaten yaitu Kabupaten Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, dan Trenggalek. Keenam kabupaten itu disebut Tunggal Rogo Mandiri. Untuk mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki, maka Gunung Wilis akan dikelola oleh 6 daerah tersebut.

Bertempat di Pendopo Kabupaten Trenggalek pada 11 Juni 2014 lalu, Tunggal Rogo Mandiri ini melakukan kesepakatan kerja sama pembangunan. Kerja sama antara daerah itu meliputi kerja sama pelayanan publik di bidang pariwisata, kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, penataan ruang, pertanian secara luas, kependudukan, lingkungan hidup, kebudayaan, ketenagakerjaan, perkoperasian, dan bidang lain sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

Kementerian PUPR melalui BPIW turut andil dalam mengembangkan infrastruktur di kawasan tersebut, dengan membuat sejumlah program. Menurut Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan pembangunan infrastruktur di Selingkar Wilis dilakukan dengan pendekatan WPS, dimana daerah ini terletak diantara 2 WPS yaitu WPS 11 Semarang-Surabaya dan WPS 12 Yogyakarta-Prigi-Bilitar-Malang.

Sebagaimana diketahui bahwa pengembangan infrastruktur sektor PUPR selalu dilakukan dengan

pendekatan WPS. Diseluruh Indonesia terdapat 35 WPS.

“Pembangunan infrastruktur sektor PUPR di Kawasan Selingkar Wilis harus dikembangkan dengan skenario pengembangan yang terintegrasi dengan kedua WPS yang mengapitnya,” ujar Rido saat Rapat Koordinasi Rencana Tindak Lanjut Kesepakatan Pengembangan Selingkar Wilis, di Madiun Jawa Timur, 11 September lalu.

Dikatakannya konsep pengembangan Selingkar Wilis berupa integrasi 6 wilayah ke dalam satu kesatuan wilayah ekonomi (dalam konteks pariwisata dan agrobisnis). Strategi pengembangan di wilayah ini melalui 3 hal yakni pertama, pengembangan agro industri, kedua, pengembangan pusat perkotaan. Strategi yang ketiga adalah pengembangan wilayah kabupaten sebagai sentra produksi pertanian lokal, regional Jawa Timur, dan perikanan.

Pengembangan Selingkar Wilis juga dilakukan untuk mengurangi disparitas yang ada. Disparitas pada bagian tengah Selingkar Wilis yakni pada Koridor Semarang-Surabaya, dimana Semarang-Surakarta dan Surabaya-Jombang mulai berkembang sebagai arus utama perdagangan dan distribusi logistik melalui jalur darat, laut (pelabuhan) dan udara (bandara).

Pada Koridor Selatan Yogya-Malang, dimana

Pembangunan infrastruktur sektor PUPR di Kawasan Selingkar Wilis harus dikembangkan dengan skenario pengembangan yang terintegrasi dengan kedua WPS yang mengapitnya,” ujar Rido.

“Pengembangan trase jalan Selingkar Wilis juga akan menciptakan keterhubungan antara satu objek destinasi dengan objek lainnya, serta meningkatkan akses antar kabupaten,” tutur Rido.

aktivitas ekonomi regional terkonsentrasi di Yogya dan Malang dan sekitarnya. Kutub pertumbuhan Yogya dan Malang belum mencapai hingga bagian tengah (Wilis). Untuk itu menurut Rido diperlukan penguatan pada bagian tengah, dengan cara pembentukan klaster baru yakni “Klaster Wilis”. Hal ini untuk mencapai kerangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

Jumlah penduduk yang ada kawasan Selingkar Wilis mencapai 4.008.000 jiwa. Rata-rata mata pencaharian penduduk di kawasan ini sebagai petani. Hasil produk pertanian di kawasan Selingkar Wilis dihadapkan pada beberapa tantangan seperti distribusi komoditas unggulan belum didukung oleh akses yang memadai, sehingga kebutuhan akan aksesibilitas sangat penting dalam rangka meningkatkan produktivitas dan distribusi komoditas unggulan daerah. “Pengembangan trase jalan Selingkar Wilis akan memperluas demand komoditi unggulan,” ucap Rido.

Tantangan lain terkait pengembangan kawasan ini yakni keberadaan objek wisata belum sepenuhnya didukung oleh akses yang memadai, sehingga kebutuhan akan aksesibilitas sangat penting dalam rangka meningkatkan daya tarik objek wisata. “Pengembangan trase jalan Selingkar Wilis juga akan menciptakan keterhubungan antara satu objek destinasi dengan objek lainnya, serta meningkatkan akses antar kabupaten,” tutur Rido.

Menurut Rido pengembangan destinasi klaster wisata mempertimbangkan sebaran permukiman penduduk lokal, variasi jenis obyek wisata, dan sistem inkubasi pariwisata (*education, entrepreneurship* dan standarisasi pelayanan).

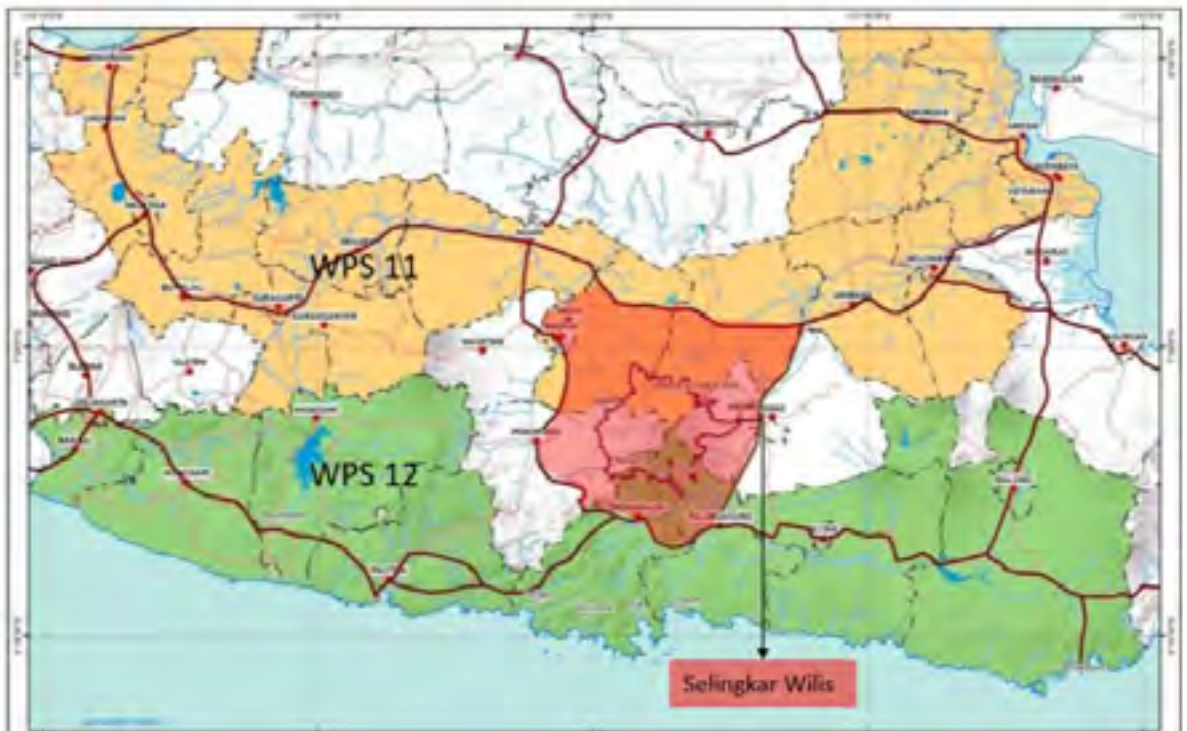
Sedangkan pengembangan klaster agribisnis tercipta karena interaksi antar komoditas atau wilayah yang memiliki singgungan rantai distribusi. Rido menilai peluang pengembangan produk sangat besar, mengingat kawasan ini kaya dengan berbagai sayur, buah, tanaman hortikultura bahkan hasil ternak.

Terkait sistem industri hulu hilir agrobisnis, kata Rido d bahwa simpul pusat industri hulu (pusat produksi) tersebar sesuai potensi daerah. Untuk pusat industri hilir berada pada masing-masing kabupaten. Sedangkan proses distribusi komoditas dari hulu ke hilir melalui akses jalan utama.

Untuk *Ultimate* Kawasan Selingkar Wilis-Prigi 2025, beberapa infrastruktur yang dibangun yakni kawasan Kopi Kandangan Madiun, Jalan Lingkar Wilis Ring 1, Bendungan Bagong, Waduk Wonorejo, Bendungan Tugu, dan Perumahan Khusus Kawasan Minapolitan.

Beberapa program strategis juga telah disiapkan melalui perencanaan dari BPIW. Untuk jalan dan jembatan, beberapa program strategis PUPR

POSISI SELINGKAR WILIS DALAM KONTEKS WPS





Rapat koordinasi antar stakeholders.

seperti pembangunan Jalan Selingkar Wilis, peningkatan jalan lokal penghubung dari atau ke kawasan perkotaan menuju jalan Selingkar Wilis (ring 1). Program strategis jalan dan jembatan lainnya adalah pembangunan jalan dari trase Selingkar Wilis ke arah puncak menuju objek-objek wisata di 6 kabupaten berupa akses alam, *hiking track* dan *trail*.

Pembangunan infrastruktur itu tujuannya untuk menghubungkan trase lingkaran dengan kluster destinasi wisata maupun dengan simpul produksi. Kemudian juga ada program strategis berupa pembangunan jalan usaha tani, sarana dan prasarana pendukung Jalan Selingkar Wilis, dan pembangunan penerangan jalan umum.

Terkait bidang Sumber Daya Air (SDA), program strategis PUPR berupa pemanfaatan sumber air di Telaga Ngebel (Kabupaten Ponorogo). Kemudian untuk program pembangunan irigasi berada di Kecamatan Ngebel, Kecamatan Pulung, dan Kecamatan Sooko (Kabupaten Ponorogo).

Pembangunan irigasi juga dilakukan di Kecamatan Bendungan (Kabupaten Trenggalek), Kecamatan Sendang dan Pagerwojo (Kabupaten Tulungagung), Kecamatan Semen (Kabupaten Kediri). Untuk Kabupaten Nganjuk dilakukan di Kecamatan Kepel, Sawahan, dan Ngetos. Sedangkan di Madiun, pembangunan irigasi di Kecamatan Kare. Program strategis bidang SDA lainnya yakni Pembangunan Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek.

• Tidak hanya itu, Kementerian PUPR juga memiliki
• 4 program strategis Bidang Cipta Karya dan
• Perumahan seperti pembangunan Sistem
• Penyediaan Air Minum (SPAM), Drainase, Jaringan
• Air Limbah, dan Sistem Instalasi Pengolahan
• Air Limbah (IPAL) dan Persampahan. Keempat
• program tersebut berada di Kabupaten Kediri
• terutama di Kecamatan Semen. Kemudian juga ada
• di Kabupaten Tulungagung yakni di Kecamatan
• Sendang dan Pagerwojo.

• Tidak hanya itu, keempat program strategis itu
• juga dilakukan di Kabupaten Trenggalek terutama
• di Kecamatan Bendungan. Selanjutnya Kabupaten
• Ponorogo yakni di Kecamatan Ngebel, Soko, dan
• Pulung. Kabupaten Madiun juga ada 4 program
• strategis ini terutama di Kecamatan Kare. Kemudian
• juga ada di Kabupaten Nganjuk yakni di Kecamatan
• Sawahan dan Loceret.

• Program strategis lainnya pada Bidang Cipta Karya
• dan Perumahan yakni Penyediaan Rumah Khusus
• Bagi Petani dan Penyediaan Rumah Khusus Bagi
• Wisatawan Pariwisata. Program pengembangan
• kawasan Selingkar Wilis dibiayai APBN dan APBD
• daerah setempat.

• Rido juga memaparkan bahwa rapat mengenai
• Selingkar Wilis yang dilaksanakan di Madiun
• tersebut, membahas rencana tindak lanjut
• pengembangan Selingkar Wilis. Sebagai
• pengangas kegiatan, BPIW 'menggandeng' 6
• Kepala Daerah dan 4 Anggota dari Komisi V
• DPR RI.

Rapat mengenai Selingkar Wilis yang dilaksanakan di Madiun tersebut, membahas rencana tindak lanjut pengembangan Selingkar Wilis. Sebagai pengangas kegiatan, BPIW 'menggandeng' 6 Kepala Daerah dan 4 Anggota dari Komisi V DPR RI.

MENGURANGI DISPARITAS BARAT-TIMUR & LINGKAR WILIS MELALUI INTEGRASI TUNGGAL-ROGO-MANDIRI

MENGINTEGRASIKAN 6 WILAYAH KE DALAM SATU KESATUAN WILAYAH EKONOMI (DALAM KONTEKS PARIWISATA DAN AGRABISNIS)



Strategi Pengembangan Wilayah:

1. Pengembangan Agro Industri
2. Pengembangan Pusat Perkotaan
3. Pengembangan Wilayah Kabupaten sebagai Sentra Produksi Peranian Lokal, Regional Jawa Timur, dan Perikanan

Enam Kepala Daerah yang hadir yakni Wakil Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak, Wakil Bupati Ponorogo, Soedjarno, Bupati Kediri, Haryanti Sutrisno, dan Bupati Madiun, Muhtarom. Sementara Bupati Nganjuk diwakili Kepala Bappeda, Bambang Eko Suharto.

Rapat ini juga dihadiri 4 Anggota Komisi V DPR RI yakni, Budi Yuwono, Gatot Sudjito, Soehartono, dan Sadarestuwati. Saat memberikan paparannya, Rido mengatakan, pengembangan Selingkar Wilis dilakukan dengan tujuan mewujudkan jejaring wisata pegunungan, pantai, panorama alam dan budaya yang bersinergi dengan pengembangan agrobisnis dan industri serta pengolahan bahan mineral untuk membangkitkan daya tumbuh kembang kawasan secara inklusif dan berkelanjutan.

"Konsep dukungan terpadu infrastruktur oleh Kementerian PUPR terbagi dalam konektivitas antar kota atau jalan nasional dan konektivitas di ring dalam Selingkar Wilis yang bisa mendorong berkembangnya wisata alam dan agrowisata serta konektivitas kawasan wisata unggulan daerah lainnya," tutur Rido.

Menurut Rido, jalan yang ada di Selingkar Wilis sudah ditetapkan sebagai jalan nasional, dan masih perlu ditingkatkan kembali kondisinya agar dapat mengembangkan kawasan itu. "Meski pembiayaan kawasan ini sangat terbatas, namun perlu dioptimalkan terutama di sektor konektivitas," tegas Rido.

Saat digelar diskusi yang dimoderatori Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Hadi

Sucahyono, Anggota Komisi V DPR RI, Soehartono memberikan pendapatnya. Menurut dia peran Sekretariat Bersama Tunggal Rogo Mandiri harus ditingkatkan dan lebih aktif untuk mendukung realisasi dari rencana yang ada. "Segera diwujudkan program ril dari BPIW, sehingga dari komisi V dapat mengawal program ini bersama Bapak Menteri," tuturnya.

Selaku tuan rumah kegiatan ini, Bupati Madiun, Muhtarom menegaskan bahwa 6 daerah harus melepaskan ego sektoral untuk bersama-sama membangun kawasan tersebut. "Selingkar Wilis mempunyai potensi yang sangat luar biasa, namun belum tergalai secara maksimal. Kedepan Selingkar Wilis dapat diproyeksikan secara konkret menjadi sumber daya alam yang dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat," kata Muhtarom.

Menurut Muhtarom berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029, pada Pasal 51 Ayat 6 disebutkan "Arahan pengembangan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (8), meliputi ruas Nganjuk – Madiun – Ponorogo (Jalan Lingkar Wilis/Ngadipono)".

Panjang jalan yang melewati Kabupaten Madiun pada pembangunan jalan tembus Ngadipono ±38,8 km. Manfaat dari terbangunnya jalan tersebut yakni mempermudah akses distribusi hasil kegiatan pertanian di wilayah Selingkar Wilis dan optimalisasi pengembangan kawasan wisata Gunung Wilis.

Bupati Trenggalek selaku Ketua Sekretariat Bersama Tunggal Rogo Mandiri, Emil Elestianto Dardak, dalam paparannya menyatakan,

"Konsep dukungan terpadu infrastruktur oleh Kementerian PUPR terbagi dalam konektivitas antar kota atau jalan nasional dan konektivitas di ring dalam Selingkar Wilis yang bisa mendorong berkembangnya wisata alam dan agrowisata serta konektivitas kawasan wisata unggulan daerah lainnya," tutur Rido.

pengembangan Selingkar Wilis ini akan memberikan dampak konkret dalam pengembangan daerah. Sebagai contoh kecil, dengan hanya dibuka jalur transportasi baru Ponorogo-Trenggalek-Tulungagung perkembangannya sudah terlihat.

Emil juga menyebutkan bahwa konsep pengembangan Kawasan Selingkar Wilis di daerahnya adalah memadukan pembangunan sektor dengan pembangunan kawasan. “Dengan pembangunan infrastruktur yang dibangun secara terpadu, diharapkan dapat melayani produksi di sentra industri, melayani aktivitas perkotaan di pusat pertumbuhan, dan menciptakan konektivitas dengan wilayah lain,” tutur Emil.

Kabupaten Trenggalek menurut Emil telah melakukan pengembangan 300 hektar perkebunan kopi lengkap dengan pabrik pengolahannya di Selingkar Wilis. Di kawasan tersebut, produksi pabrik kopi yang dapat dihasilkan mencapai 5 ton / hari biji kopi kering. “Pengembangan kawasan agropolitan ini tujuannya adalah mencapai sentra ekonomi rakyat yang merupakan poros pariwisata Trenggalek di wilayah utara,” ungkap Emil.

Wakil Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo mengatakan bahwa Kecamatan Sendang dan Pagerwojo yang terletak pada Kawasan Selingkar Wilis memiliki potensi agropolitan, seperti Bunga Krisan, sayur dan hortikultura. Selain itu juga ada potensi pariwisata yang ada di kawasan tersebut seperti Air Terjun Lawean, Air Terjun Jurang Senggani, dan Wisata Alam Jurang Senggani. Ia berharap dengan adanya pengembangan konektivitas di wilayah selatan, dapat mendukung potensi yang ada di daerahnya yang termasuk dalam kawasan Selingkar Wilis.

“Saya berharap pembangunan jalan tol tidak hanya dari Kertosono-Kediri, akan tetapi bisa diteruskan hingga Tulungagung atau Trenggalek, sehingga investasi tidak selalu masuk di wilayah tengah Jawa Timur,” tegas Maryoto. Selain itu juga meminta pembangunan Jalan Lintas Selatan dapat dilakukan percepatan, karena ada sekitar 3,9 km yang perlu mendapat penanganan

Wakil Bupati Ponorogo, Soedjarno menambahkan potensi daerahnya pada dasarnya hampir sama dengan Kabupaten Trenggalek. Oleh karenanya ia menyatakan bahwa diperlukan peningkatan beberapa ruas jalan di Kabupaten Trenggalek. Hal ini untuk mendukung sektor ekonomi strategis seperti yang ada di daerahnya dan Kediri.

Ia juga mengakui bahwa Pemerintah Kabupaten Ponorogo kesulitan melakukan pengembangan atau pembangunan di kawasan tersebut karena adanya keterbatasan dana. Meski demikian ia berharap ada *timeline* yang jelas terkait pengembangan kawasan Lingkar Wilis termasuk target-target yang ingin dicapai.

“Perlu ada peran yang lebih aktif, termasuk dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendorong pengembangan Kawasan Selingkar Wilis mengingat kawasan ini telah direncanakan sejak lama,” ucap Soedjarno.

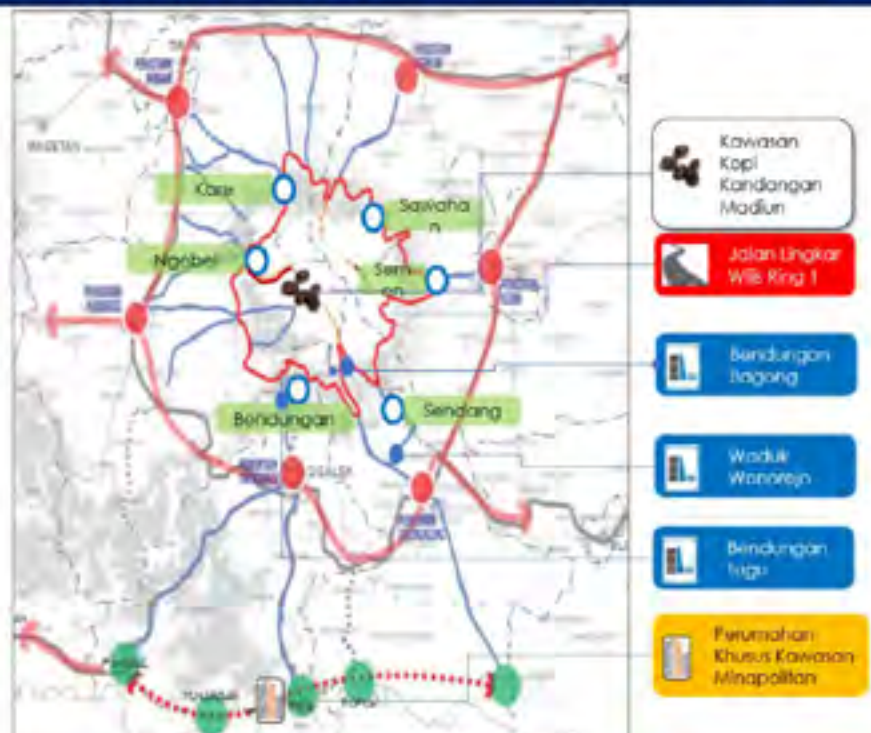
Dalam mengembangkan kawasan tersebut, Bupati Kediri, Haryanti Sutrisno menjelaskan bahwa daerahnya telah berupaya melakukan pembangunan jalan sekitar kurang lebih 30 km terutama untuk Jalan Sirip. Meski demikian diakuinya pembangunan jalan lingkar dalam cukup berat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu ia berharap jalan lingkar ini dapat ditangani oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi Jawa Timur.

Bupati Nganjuk diwakili Kepala Bappeda, Bambang Eko Suharto menyampaikan bahwa instansinya telah berkomitmen melakukan pengembangan infrastruktur di kawasan Lingkar Wilis seperti jalan hingga sumber daya air. Dikatakannya bahwa ruas jalan nasional di Kabupaten Nganjuk yang tergabung dalam konektivitas Madiun – Kertosono masih belum memenuhi standar. “Peningkatan kualitas di ruas jalan ini diperlukan mengingat ruas jalan ini merupakan jalan yang cukup padat terutama saat liburan,” tutur Bambang.

Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa pengembangan Kawasan Selingkar Wilis direalisasikan hingga 2022 mendatang. Selain itu kawasan tersebut diusulkan menjadi kawasan strategis nasional. Kegiatan ini dilanjutkan dengan perumusan rencana tindak lanjut yang dibahas beberapa instansi seperti Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Kepala Dinas PUPR Jawa Timur, dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Surabaya, perwakilan Bappenas, serta Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. **Tim Redaksi**

“Saya kira perlu ada peran yang lebih aktif, termasuk dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendorong pengembangan Kawasan Selingkar Wilis mengingat kawasan ini telah direncanakan sejak lama,” ucap Soedjarno.

ULTIMATE KAWASAN SELINGKAR WILIS-PRIGI 2025



Sumber: PUPR



Judul Buku : Buku Pintar Etiket hijau: 300 Cara bijak
Ramah Lingkungan dan Menghemat uang
Penulis : Mien R. Uno dan Siti Gretiani
Penerbit : Kompas Gramedia
Tahun Terbit : 2011

Menyelamatkan Bumi dengan Cara Bijak

Saat ini slogan “go green” menggema dimana-mana, yang menunjukkan meningkatnya kepedulian akan lingkungan. Sebagai individu, kita bisa membantu menyelamatkan bumi tanpa perlu melakukan hal-hal sulit, misalnya melestarikan badak bercula atau harimau Sumatra, namun kita cukup mengubah perilaku dan gaya hidup sehari-hari menjadi lebih ramah lingkungan. Mulai dari di mana kita tinggal, apa yang kita pakai, apa yang kita makan, alat transportasi kita, sampai bagaimana pola belanja kita. Semuanya memberi pengaruh global.

Oleh karena itu, sangat penting menjalankan hidup yang beretiket hijau, karena tindakan ini akan memberi pengaruh positif yang signifikan. Tidak hanya demi menjadikan planet ini tempat yang lebih nyaman untuk ditinggali, namun juga demi meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan hingga ribuan generasi mendatang.

Buku ini berisi 300 tindakan beretiket hijau, yang dapat kita lakukan dengan mudah dalam hidup kita sehari-hari, menghemat uang, dan bisa kita terapkan untuk mendidik anak agar anak kita berwawasan lingkungan sejak usia dini. Taburlah cinta kepada lingkungan kita, maka bumi pun akan menyayangi kita. **Mutri**

“Buku ini berisi 300 tindakan beretiket hijau, yang dapat kita lakukan dengan mudah dalam hidup kita sehari-hari, menghemat uang, dan bisa kita terapkan”

Istilah Tentang Konektivitas

Salah satu fokus pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan konektivitas antara satu kawasan dengan kawasan lainnya. Untuk menambah wawasan pembaca, berikut beberapa istilah tentang konektivitas tersebut.

Konektivitas: Kondisi yang menyebabkan atau memungkinkan dua atau lebih pusat pelayanan saling terhubung untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan wilayah.

Konektivitas Wilayah: Salah satu strategi untuk percepatan dan perluasan pembangunan dengan

- (1) menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan
- (2) menghubungkan *hinterland* atau wilayah belakang dengan pusat-pusat pertumbuhan
- (3) membangun infrastruktur dan pelayanan dasar di daerah terpencil untuk mendapatkan manfaat pembangunan dan mencapai pertumbuhan inklusif

Konektivitas Fisik: *hard infrastructure*, merujuk pada infrastruktur fisik yang mempermudah perdagangan dan perjalanan regional yang mencakup pelabuhan, jalan, bandar udara, dan rel kereta api.

Konektivitas Institusional: Keterhubungan berbagai persetujuan ataupun protocol internasional dan regional untuk memfasilitasi berbagai transaksi barang dan jasa internasional, dan juga perpindahan alami manusia lintas batas

Konektivitas Nasional: Penyatuan empat elemen kebijakan nasional yaitu Sistem Logistic Nasional (Sislognas), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Pengembangan Wilayah (RPJMN/RTRWN), dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT).

Konektivitas Perseorangan: Mengembangkan berbagai inisiatif untuk mendukung pendidikan dan mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia, mendorong wirausaha, mendukung pertukaran budaya, dan mempromosikan turisme dan industri terkait.

(Sumber: Kamus Istilah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah)



Perencanaan Infrastruktur PUPR Perlu Dipertajam

Ir. Budi Yuwono, DIPL, SE

.....
Anggota Komisi V DPR RI/ Dirjen Cipta Karya Kementerian PU Periode 2008-2012

Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) secara konsisten membuat perencanaan pembangunan infrastruktur. Bagi Anggota Komisi V DPR RI, Ir. Budi Yuwono, DIPL, SE, perencanaan yang dibuat BPIW seperti masterplan atau rencana induk suatu wilayah, bukan hanya masterplan secara umum semata, tapi masterplan yang juga memuat standar-standar teknis pengerjaan infrastruktur yang

lebih tajam, sehingga dapat menjadi guide atau panduan yang jelas bagi pihak-pihak terkait. Seperti apa pandangan wakil rakyat yang pernah menjabat sebagai Dirjen Cipta Karya Kementerian PU Periode 2008-2012 tersebut seputar pembangunan infrastruktur PUPR?. Simak wawancaranya dengan 'Buletin Sinergi' dari beberapa kesempatan berikut ini.

Bagaimana Bapak melihat perencanaan infrastruktur yang dilakukan BPIW hingga saat ini?

Perencanaan infrastruktur yang dilakukan BPIW sudah cukup baik. Apalagi BPIW membuat *masterplan* atau rencana induk pembangunan infrastruktur PUPR seluruh pulau di Indonesia. *Masterplan* tersebut harusnya menjadi standar dalam membangun infrastruktur seperti jalan maupun perumahan. Dalam membangun infrastruktur, perlu dipererat dengan kerja sama semua pihak termasuk dengan pemerintah daerah, sehingga hasil pembangunannya dapat lebih maksimal.

Bagaimana realisasi pembangunan infrastruktur PUPR dari perencanaan BPIW?

Realisasi pembangunan infrastruktur ini perlu didasari para perencanaan yang dibuat secara konkret. Artinya perencanaan yang dibuat seperti *masterplan* suatu wilayah, bukan hanya *masterplan* secara umum semata, tapi *masterplan* itu juga memuat standar-standar teknis pengerjaan infrastruktur yang lebih tajam, sehingga dapat menjadi *guide* atau panduan yang jelas bagi pihak-pihak terkait.

Sebetulnya Kementerian PUPR punya peran besar dalam merealisasikan infrastruktur yang bermanfaat

bagi masyarakat. DPR RI hanya sebagai lembaga yang mengesahkan anggaran, sedangkan mengenai anggaran tersebut digunakan untuk apa, menjadi tanggung jawab instansi pemerintah termasuk Kementerian PUPR sebagai penanggung jawab pengguna anggaran.

Apa yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur, apakah daerah perbatasan lebih diprioritaskan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dimata internasional?

Iya, betul, kawasan perbatasan memang menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur. Sebab daerah perbatasan berhubungan langsung dengan negara lain. Hal itu merupakan amanah dari Nawa Cita yakni membangun dari pinggiran. Kalau dilihat apa yang sudah dilakukan pemerintahan saat ini, gerakannya dalam membangun infrastruktur seluruh negeri sudah cukup bagus. Tinggal lagi bagaimana sumber daya manusia atau SDM perlu ditingkatkan kemampuannya, terutama SDM di daerah. Mudah-mudahan dorongan dari Kementerian PUPR bisa menggerakkan SDM yang ada di daerah.

Bagaimana anda melihat percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah dapat mengikis disparitas, terutama antara kawasan timur dan barat Indonesia?

“Perencanaan infrastruktur yang dilakukan BPIW sudah cukup baik. Apalagi BPIW membuat *masterplan* atau rencana induk pembangunan infrastruktur PUPR seluruh pulau di Indonesia. *Masterplan* tersebut harusnya menjadi standar dalam membangun infrastruktur seperti jalan maupun perumahan”



Jembatan Merah Putih di Ambon

KETERPADUAN TERHADAP PENGEMBANGAN 10 PKSN PERBATASAN 2015-2019 [PERBATASAN]



10 PKSN Konsentrasi Pengembangan 2015-2019

Sumber: Rencana Induk Perbatasan 2015-2019

16 Tahapan Persiapan Pengembangan PKSN

PKSN Perbatasan	PKSN Perbatasan	PKSN Perbatasan	PKSN Perbatasan
Jagoi Babang	Long Pahangai	Tanah Merah	Kalabahi
Jasa	Simanggaris	Dumai	Ilwaki
Long Nawang	Kefamenanu	Batam	Dobo
Long Midang	Merauke	Melonguane	Daruba

Saya melihat pembangunan telah dilakukan secara merata di seluruh kawasan. Namun pemerintah lebih mengoptimalkan pembangunan di kawasan timur Indonesia, itu sudah bagus sekali. Pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia sudah luar biasa pembangunannya. Bagi saya, hal itu sudah mengubah wajah Indonesia.

Hanya saja masalahnya, bila kita membangun kawasan timur Indonesia, apakah respon pemerintah daerah di kawasan itu lebih cepat dengan di Pulau Jawa?, kan tidak begitu cepat. Untuk itu diperlukan sinergitas antara pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga percepatan pembangunan dapat benar-benar direalisasikan secara maksimal.

Apa yang menjadi tantangan pembangunan infrastruktur di tanah air?

Tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan kita dalam membangun infrastruktur itu adalah dari segi pendanaan. Hal ini dikarenakan anggaran negara kita

terbatas. Untuk itu perlu terobosan untuk mengatasi terbatasnya anggaran, seperti melalui kerja sama dengan pihak swasta. Saya melihat daerah-daerah kita perlu dibimbing agar lebih optimal dalam membangun infrastruktur daerahnya. Untuk itu BPIW dapat juga berperan dalam membina daerah-daerah tersebut, sehingga daerah lebih kuat dalam pembinaan dari BPIW.

Ada 2 opsi yang dapat dilakukan terkait pembiayaan pembangunan infrastruktur, terutama di Selingkar Wilis, yakni APBD maupun Dana Alokasi Khusus atau DAK Penugasan. Kementerian PUPR dan Bappenas dapat mendorong pembangunan kawasan tersebut ke dalam DAK Penugasan.

Bagaimana Bapak melihat keterpaduan yang dilakukan saat ini?

Keterpaduan yang sudah dilakukan sudah cukup baik, seperti yang digagas BPIW dengan menghadirkan 6 kabupaten di Selingkar Wilis dan juga menghadirkan

“Tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan kita dalam membangun infrastruktur itu adalah dari segi pendanaan. Hal ini dikarenakan anggaran negara kita terbatas. Untuk itu perlu terobosan untuk mengatasi terbatasnya anggaran, seperti melalui kerja sama dengan pihak swasta”.

kita dari Komisi V DPR RI untuk membicarakan pengembangan Selingkar Wilis. Setelah keterpaduan sudah dilakukan, maka langkah lain yang perlu dilakukan BPIW adalah melakukan penajaman pembangunan infrastruktur, mengingat daerah-daerah yang ada di Selingkar Wilis memiliki potensi yang besar.

Harus ada komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten terutama terkait kewenangan masing-masing daerah, sehingga pembangunan infrastruktur tidak hanya mengandalkan dana APBN, tetapi juga ada dukungan dari *stakeholder* lain diluar pemerintah pusat.

Gagasan pengembangan Kawasan Lingkar Wilis pada dasarnya sudah lengkap akan tetapi dirasa belum mengakomodir seluruh potensi masing-masing kabupaten. Oleh karena itu diharapkan pemerintah kabupaten dapat memasukkan potensi-potensi yang belum terakomodir.

Pengembangan jalan nasional diharapkan dapat ditangani oleh pemerintah pusat. Sementara untuk jalan-jalan sirip diharapkan dapat diusahakan oleh pemerintah kabupaten. Pengembangan Jalan ini diharapkan juga difokuskan pada klaster-klaster yang saat ini sudah sangat strategis.

Dengan demikian akan semakin meningkatkan nilai dari potensi yang ada seperti komoditas sapi perah yang saat ini sudah sangat potensial, meskipun potensi itu harus didukung dengan kondisi jalan yang memadai.

Apa peran dari DPR RI, terutama Komisi V terkait pembangunan infrastruktur ?

Komisi V DPR RI akan memperjuangkan pembangunan infrastruktur dalam ranah politik anggaran, akan tetapi diharapkan BPIW dan Bappenas dapat menjadi *leader* dalam mengawal pengembangan infrastruktur. Kita dari DPR RI secara konsisten akan mengawasi pembangunan infrastruktur di daerah.

Apa harapan Bapak terhadap BPIW?

Harapan kita perencanaan yang dibuat BPIW dalam membangun infrastruktur PUPR dapat menjadi pedoman yang kuat, yang dilaksanakan di daerah. Jadi pedomannya dari pemerintah pusat, sedangkan detail desainnya bisa dari pemerintah daerah.

“Keterpaduan yang sudah dilakukan sudah cukup baik, seperti yang digagas BPIW dengan menghadirkan 6 kabupaten di Selingkar Wilis dan juga menghadirkan kita dari Komisi V DPR RI untuk membicarakan pengembangan Selingkar Wilis”.



“Komisi V DPR RI akan memperjuangkan pembangunan infrastruktur dalam ranah politik anggaran, akan tetapi diharapkan BPIW dan Bappenas dapat menjadi *leader* dalam mengawal pengembangan infrastruktur”.

Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

Kami mengumpulkan guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengan Kementerian PUPR. Guntingan berita tersebut kami sarikan dari 5 media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Investor Daily, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu, dapat berguna sebagai media monitoring BPIW. Berikut ini adalah 1 potongan pemberitaan tersebut.

BPIW Dapat Rp248,3 Miliar

JAKARTA — Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 mendapatkan pagu indikatif senilai Rp248,3 miliar.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rido Matari Ichwan mengatakan selama dua tahun berdiri BPIW telah menghasilkan 10 produk

strategis yang mengacu pada tugas dan fungsi seperti Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2015—2019.

"BPIW adalah tujuh rencana induk pengembangan infrastruktur untuk tujuh pulau besar di Indonesia, mulai pulau Sumatra, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara serta Papua," ujarnya, Senin (16/9).

Menurutnya, terdapat 35 MPDP Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Kemudian, 12 MPDP kawasan strategis serta 22 MPDP kawasan

perkotaan. Selain itu terdapat 14 MPDP Kawasan Perlesan Prioritas Nasional serta dokumen keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi program 35 WPS untuk program jangka pendek 3 tahun.

BPIW tengah menyiapkan dokumen kebutuhan pembiayaan infrastruktur wilayah dan kawasan, proses kredit Bank Dunia untuk Integrated Tourism Masterplan tiga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional prioritas, serta produk berupa dukungan sistem informasi. *Yusita Perwita*





Teropong media edisi kali ini, akan membahas mengenai berita yang dimuat di koran Bisnis Indonesia, Selasa, 19 September 2017 pada halaman 27. Berita tersebut diberi judul “BPIW Dapat Rp 248,3 Miliar”. Berikut Ulasannya :

BPIW Siap Menghasilkan Produk Unggulan, Berapapun Anggaran yang Diberikan Pemerintah

Dalam berita itu disebutkan bahwa dalam rancangan anggaran pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, BPIW Kementerian PUPR mendapatkan pagu indikatif senilai Rp 248,3 miliar.

Pada paragraf berikutnya Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menyebutkan bahwa selama dua tahun berdiri BPIW telah menghasilkan 10 produk strategis. Kesepuluh produk strategis itu, salah satunya 7 rencana induk pengembangan kawasan di tujuh pulau besar yakni Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua.

Dari pernyataan Kepala BPIW tersebut menunjukkan bahwa berapapun anggaran yang diberikan pemerintah, BPIW selalu akan menghasilkan produk-produk unggulannya seperti *masterplan* atau rencana induk maupun *development plan* atau rencana pengembangan. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi BPIW.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ditegaskan bahwa tugas BPIW adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Dalam peraturan itu juga disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan tugasnya, BPIW menjalankan 6 fungsinya. Fungsi pertama adalah penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Fungsi kedua adalah penyusunan strategi keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Ketiga, pelaksanaan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat. Kemudian fungsi BPIW yang keempat adalah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Selanjutnya, fungsi BPIW yang kelima yakni pelaksanaan administrasi BPIW. Fungsi yang terakhir atau fungsi BPIW yang keenam adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Tugas dan fungsi atau tuis tersebut, merupakan amanah yang terus dipegang teguh BPIW untuk dilaksanakan secara maksimal. Tidak hanya melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugasnya, kini BPIW juga diamanatkan pemerintah mengawal pelaksanaan *integrated tourism masterplan* atau integrasi rencana induk kepariwisataan untuk 3 destinasi wisata yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), dan Mandalika (NTB). BPIW mengawal mulai dari proses lelang perusahaan penyedia jasa hingga pelaksanaan di lapangan nantinya.

Bagi BPIW, melaksanakan tugas diluar tuis ini merupakan kebanggaan tersendiri, karena hal itu menunjukkan adanya kepercayaan dari pemerintah untuk mengintegrasikan rencana induk kepariwisataan ini dari berbagai sektor, seperti sektor pariwisata, infrastruktur PUPR, dan perhubungan. Diharapkan dari hasil *integrated tourism masterplan* ini dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Tidak hanya pada 3 destinasi wisata itu saja, BPIW juga siap untuk mengawal proses *integrated tourism masterplan* pada 7 destinasi wisata lainnya, yakni Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), Bromo Semeru Tengger (Jawa Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Pulau Komodo (NTT), dan Morotai (Maluku Utara). Dengan kata lain, BPIW siap selalu melaksanakan tugasnya berapapun anggaran yang diberikan pemerintah.

Kementerian PUPR Dorong Pemda Implementasikan *New Urban Agenda*



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pemerintah daerah (pemda) mengimplementasikan *New Urban Agenda* (NUA) melalui pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal dan pemberdayaan

dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Pemberdayaan Komunitas". Kegiatan ini digelar Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa hari lalu.

Kota memberikan pelayanan menuju kemakmuran dan peluang yang berkelanjutan. Termasuk, perencanaan dan pengelolaan tata ruang perkotaan serta membangun struktur pemerintahan perkotaan

Agusta mengatakan, prinsip agenda baru perkotaan salah satunya adalah pengembangan kawasan perkotaan harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan hidup dengan mendorong energi bersih dan pemanfaatan lahan dan sumber daya yang berkelanjutan, dan melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Dengan demikian pembangunan yang dilakukan diarahkan berbasis budaya lokal dan pemberdayaan komunitas.

Agusta menambahkan, kota memberikan pelayanan menuju kemakmuran dan peluang yang berkelanjutan. Termasuk, perencanaan dan pengelolaan tata ruang perkotaan serta membangun struktur pemerintahan perkotaan.

komunitas, terutama untuk daerah yang berada di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Dalam mendukung pengembangan perkotaan yang berbasis aspek pariwisata, lanjutnya, Kementerian PUPR telah menggulirkan sejumlah program, antara lain Penataan Desa Wisata, Program Kota Tanpa Kumuh, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Program Pengembangan Infrastruktur

Demikian diungkapkan Kepala Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga dalam seminar nasional dengan tema "Implementasi *New Urban Agenda*



BPIW mengajak pemda mengimplementasikan New Urban Agenda (NUA).

Sumber: Dok. BPIW

Ekonomi Wilayah (PISEW), Infrastruktur Sebagai *Landmark* Kawasan Perkotaan, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Kemudian ada program Penataan Bangunan Sesuai Budaya Lokal, Pengembangan Kota Hijau (P2KH) serta Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka.

Agusta juga menerangkan bahwa Program Kotaku merupakan salah satu upaya strategis dalam percepatan penanganan permukiman kumuh. Sebagai program yang berbasis pemberdayaan masyarakat, Program Kotaku telah dilaksanakan di 34 provinsi.

Program tersebut menurut Agusta untuk meningkatkan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, kawasan dan kabupaten/kota.

Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk

keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh.

Selain itu, ada BSPS atau bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat

Tanjung Lesung, Morotai, Mandeh, Toraja, Wakatobi,” terang Agusta.

Dalam seminar ini dihadiri beberapa pembicara, yakni Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kementerian Perhubungan, Wisnubroto; Ketua ASPI 2015-2017, Tubagus Furqon Sofhani; Kepala Dinas Pariwisata NTB, H Lalu M Faozal serta budayawan Suku Sasak, H. Lalu Agus Fathurrahman. (*InfoBPIW)

Program BSPS ini diharapkan mampu meningkatkan keswadayaan, sehingga masyarakat dapat menikmati rumah yang aman, nyaman, sehat dan layak huni. “Lokasi penerima BSPS pada KSPN Prioritas seperti di Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Morotai, Mandeh, Toraja, Wakatobi,” terang Agusta.

berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan. Program BSPS ini diharapkan mampu meningkatkan keswadayaan, sehingga masyarakat dapat menikmati rumah yang aman, nyaman, sehat dan layak huni. “Lokasi penerima BSPS pada KSPN Prioritas seperti di Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu,

Potret Pola Ideal Perkotaan di Tanah Air, BPIW Susun Buku SOIC 2017

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR saat ini tengah menyusun sumber data kebijakan perkotaan, permukiman dan perumahan, serta infrastruktur dasar PUPR bagi para pemangku kebijakan di pusat maupun pemerintah daerah.

Demikian terungkap dalam diskusi mengenai Penyusunan Buku *The State of Indonesian Cities* (SOIC) 2017: "Membangun Identitas Kota-Kota Indonesia" di Jakarta, akhir pekan lalu.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, buku yang targetnya dapat diluncurkan pada Hari Bakti (Harbak) PU ke-72 ini, diharapkan dapat memberikan pola ideal dari dinamika perkotaan yang terjadi pada kota-kota di Indonesia.

"Buku ini juga diharapkan dapat memfasilitasi *discourse* (wacana,-red)

tentang perkembangan perkotaan Indonesia di kancah ilmu pengetahuan tingkat internasional," ungkap Rido.

Dikatakannya bahwa BPIW merasa perlu menyusun buku mengenai SOIC 2017 tersebut. Sebab, saat ini belum ada publikasi resmi tentang kondisi perkotaan terkini di Indonesia yang dapat digunakan dalam berbagai forum ilmiah tingkat internasional.

Rido menegaskan, saat ini fenomena dunia dimana banyak wilayah menjadi kota, sehingga akan membutuhkan perspektif Indonesia sebagai negara kepulauan tropis terbesar di dunia dalam mencari solusi perkotaan.

Keragaman budaya dan keunikan *landscape* serta biodiversitas alam Indonesia, Rido meyakini, pola ideal perkotaan di Indonesia akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan perkotaan yang diperlukan dunia.

Lebih lanjut Rido mengatakan, prinsip penulisan buku SOIC 2017 perlu menggambarkan kondisi terkini dari berbagai aspek dari perkotaan. "Narasi yang disajikan harus menggunakan kosa kata baku, agar mudah dimengerti serta perlu dilengkapi dengan berbagai infografis yang menarik," kata Rido.

Kemudian ada deskripsi perkembangan kota-kota di suatu negara, *region*, atau dunia, baik tantangan, keberhasilan, maupun harapan dalam pembangunan kota.

Rido juga memandang perlu adanya pembahasan yang menitikberatkan aspek sosial budaya. "Yang perlu dibahas secara mendalam adalah kondisi perkotaan di Indonesia yang saat ini sedang mencari bentuk dan identitas baru," jelas Rido.

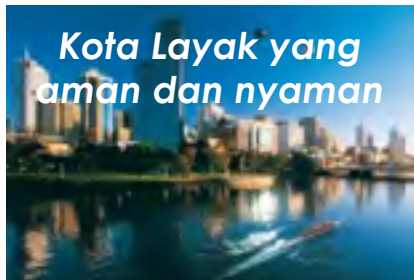
Di tempat sama, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan,

KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL

PEMBANGUNAN PERKOTAAN 2015 - 2045

Sumber: RPJPN

Kota Berkelanjutan dan Berdayasaing untuk Kesejahteraan Masyarakat



Lingkungan yang berkualitas

Walkable

Terjangkau/ekonomis

Nyaman

Berbasis budaya

Konektivitas



RTH

Pengelolaan sampah berkelanjutan

Transportasi berkelanjutan

Pengelolaan air berkelanjutan

Pengelolaan Energi berkelanjutan

Bangunan berkelanjutan

Berketahanan



Ekonomi cerdas

Komunitas cerdas

Pemerintahan cerdas

Mobilitas cerdas

Lingkungan cerdas

Kehidupan cerdas

Membangun IDENTITAS PERKOTAAN INDONESIA berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi, budaya lokal

Membangun keterkaitan dan manfaat antarkota dan desa-kota dalam SISTEM PERKOTAAN NASIONAL berbasis kewilayahan

BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga menambahkan, format penulisan buku SOIC 2017 akan bersifat umum.

Ia juga menjelaskan bahwa penulisannya akan bersifat deskriptif-eksploratif, karena tujuan utamanya untuk menunjukan kekinian situasi perkotaan di Nusantara.

“Cara penulisannya akan berorientasi *looking-forward* (memandang kedepan-red). Bahasanya juga akan banyak menggunakan ilmiah populer sesuai dengan target pembaca masyarakat umum dan pemangku kebijakan,” jelasnya.

Beberapa kalangan yang turut hadir dalam diskusi tersebut, seperti praktisi *Corporate Social Responsibility* (CSR), M. Jalal, *Team*

“Yang perlu dibahas secara dalam adalah kondisi perkotaan di Indonesia yang saat ini sedang mencari bentuk dan indentitas baru,” jelas Rido.

Leader Divisi Pembiayaan Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Ery Hartito.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Pakar Hukum Tata Negara UI, Bani Pamungkas, Aktivis Kelompok Keahlian Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Kebijakan, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) – ITB, Andi Oetomo (**ris/infoBPIW**)

BPIW Dorong Pengembangan Infrastruktur Pasuruan sebagai Kota Pusaka



Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendorong akselerasi pengembangan infrastruktur di Kota Pasuruan sebagai dukungan dalam mewujudkan Kota Pusaka.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi kunjungan kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan yang dipimpin langsung Wali Kota Pasuruan, Setiyono di kantor BPIW, Jakarta, Rabu (13/9).

Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan mengatakan, banyak hal yang perlu dilakukan dalam mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota Pusaka. Salah satunya adalah Pemkot perlu menciptakan sesuatu yang khas.

“Keberadaan sesuatu yang menjadi ciri khas akan menjadikan daya tawar Kota Pasuruan dalam menarik minat kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara,” jelas Rido.

Menurutnya, untuk lingkup nasional lokasi

Kota Pasuruan merupakan wilayah yang strategis, yakni masuk dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 14, Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi.

Kementerian PUPR, papar Rido, saat ini

“Salah satunya Pemkot perlu menciptakan sesuatu yang khas. Keberadaan sesuatu yang menjadi ciri khas akan menjadikan daya tawar Kota Pasuruan dalam menarik minat kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara,” jelas Rido.

menggunakan metode pengembangan infrastruktur berbasis wilayah atau WPS. “Dalam mengembangkan infrastruktur di Kota Pasuruan, seluruh unit organisasi teknis di Kementerian PUPR tinggal

melakukan pendetailan dari *masterplan* dan *development plan* WPS 14 yang telah disusun BPIW,” terangnya.

Lebih lanjut, Rido mengatakan, Kota Pasuruan juga beruntung karena lokasinya berdekatan dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas Bromo-Tengger-Semeru (BTS). Sebab, dalam pengembangan infrastruktur KSPN tersebut akan berdampak pada pengembangan infrastruktur di Kota Pasuruan.

“Dari *masterplan* dan *development plan* KSPN BTS itu, dalam detail pengembangan infrastrukturnya melingkupi kawasan-kawasan di sekitarnya, yang salah satunya Kota Pasuruan,” ungkap Rido.

Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW, Benny Hermawan menambahkan, Kementerian PUPR pada tahun 2017 telah melakukan investasi di wilayah Pasuruan mencapai Rp 100 miliar



BPIW dan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan sepakat lakukan percepatan pengembangan Kota Pusaka di Pasuruan.

Sumber: Dok. BPIW

lebih. "Dukungan dari Kementerian PUPR itu sifatnya memang menyebar di banyak lokasi," jelas Benny.

Guna melakukan akselerasi pengembangan Kota Pasuruan sebagai Kota Pusaka diperlukan *grand desain* yang aplikatif. "Dalam penyusunan *grand desain* itu, tentu perlu ada sinergi terkait anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu juga diperlukan peran swasta," tegas Benny.

Sementara itu, Setiyono yang didampingi jajaran pejabat Pemkot Pasuruan menyatakan, Pemkot Pasuruan setelah ditetapkan sebagai Kota Pusaka telah melakukan sejumlah pembenahan.

"Seperti melakukan penanganan terhadap sejumlah *icon* bangunan yang menjadi simbol kota tua, agar berfungsi lebih maksimal lagi," ujar Setiyono.

Ia menjelaskan, beberapa bangunan kuno yang ada di Kota Pasuruan seperti Gedung

Harmoni, Pelabuhan Rakyat dan Gedung Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dan lainnya.

"Bahkan untuk Gedung P3GI yang dibangun

Menurutnya, pengembangan Kota Pusaka di Kota Pasuruan akan dipusatkan pada Jalan Balai Kota Pasuruan hingga Jalan Pahlawan yang banyak berdiri gedung-gedung bersejarah.

"Dalam penyusunan *grand design* itu, tentu perlu ada sinergi terkait anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu juga diperlukan peran swasta," tegas Benny.

pada zaman pemerintahan Belanda akan dibuka untuk umum, agar masyarakat yang selama ini hanya mengenal luarnya saja, dapat mengenal lebih jauh lagi dari dalamnya," tegas Setiyono.

Untuk sarana dan prasarana untuk mendukung Kota Pusaka terus dipersiapkan, agar masyarakat luas makin merasa nyaman dan mendapatkan sesuatu yang positif saat berkunjung ke Kota Pasuruan.

"Berbagai *icon* bangunan bersejarah ini, akan dipadukan dalam wisata Kota Pusaka sebagai sarana pembelajaran masyarakat," terangnya.

Ia berharap, kunjungan jajaran Pemkot Pasuruan ke BPIW Kementerian PUPR akan berdampak terhadap percepatan pengembangan infrastruktur di Kota Pasuruan dalam mewujudkan konsep Kota Pusaka. ([ris/infoBPIW](#))

Pembangunan Anjungan Cerdas di Bali Sudah Mencapai 80 Persen

Kementerian PUPR saat ini tengah menyelesaikan pembangunan dua Anjungan Cerdas yakni yang berada di sekitar bendungan Tugu di Trenggalek, Jawa Timur dan di Rambut Siwi, Bali.

kontrak,red) untuk dua *rest area* yang berada di jalan nasional tersebut diselesaikan pada bulan Mei 2018.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matarichwan mengatakan Anjungan Cerdas di Bali ini berada dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Gilimanuk-Denpasar-Padang Bai.

“Selain untuk memasarkan produk-produk unggulan lokal yang ada, masyarakat juga dapat berlomba menampilkan kreasi-kreasi seni, karena dalam anjungan cerdas ini terdapat panggung pertunjukan serta *amphitheater* yang dibangun khusus untuk menampilkan beragam kesenian khas Bali,” ungkap Rido

“Selain untuk memasarkan produk-produk unggulan lokal yang ada, masyarakat juga dapat berlomba menampilkan kreasi-kreasi seni, karena dalam anjungan cerdas ini terdapat panggung pertunjukan serta *amphitheater* yang dibangun khusus untuk menampilkan beragam kesenian khas Bali,” ungkap Rido belum lama ini.

Anjungan Cerdas di Trenggalek terus dipercepat penyelesaiannya sesuai target. Sedangkan anjungan di Bali sudah mencapai 80 persen. Ditargetkan *rest area* non tol di Pulau Dewata tersebut dapat diselesaikan akhir tahun 2017. Hal ini merupakan sebuah prestasi, karena target awal (sesuai

Menurut Rido, BPIW mengembangkan konsep Michi No Eki dari Jepang ke dalam bentuk anjungan cerdas yang merupakan kumpulan bangunan di dalam satu kawasan terintegrasi yang terletak di pinggir jalan nasional. Fungsi anjungan ini untuk melayani pengguna jalan serta masyarakat lokal dengan fungsi



Pembangunan anjungan Cerdas di Rambut Siwi, Bali

Sumber: Dok. BPIW

informasi, promosi, edukasi, dan pariwisata. Anjungan cerdas ini dilengkapi aktivitas penunjang dan dibangun oleh penyelenggara jalan.

“Di dalam anjungan cerdas ada kawasan-kawasan khusus untuk dikembangkan. Hadirnya anjungan cerdas tersebut juga sebagai upaya pengembangan wilayah, seperti Anjungan Cerdas yang ada di Trenggalek, merupakan bagian dari upaya pengembangan Selingkar Wilis, yakni Kabupaten Trenggalek, Ponorogo, Tulung Agung, Madiun, Kediri, Nganjuk,” terang Rido.

Selain memiliki lahan parkir yang memadai sebagai fungsi *rest area*, menurut Rido,

didalam anjungan cerdas ini ditambahkan dengan adanya pemasaran produk-produk lokal sebagai *showcase* atau contoh yang

“Hadirnya anjungan cerdas tersebut juga sebagai upaya pengembangan wilayah, seperti Anjungan Cerdas yang ada di Trenggalek, merupakan bagian dari upaya pengembangan Selingkar Wilis, yakni Kabupaten Trenggalek, Ponorogo, Tulung Agung, Madiun, Kediri, Nganjuk,” terang Rido.

bisa dibelanjakan secara retail/grosir serta ruang informasi infrastruktur di wilayah sekitarnya. Pada bulan Juli lalu, Komisi V DPR RI sempat melakukan peninjauan Anjungan

Cerdas di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Anjungan cerdas yang tengah dibangun ini langsung mendapat apresiasi para anggota dewan yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis.

Fary menyatakan, pembangunan anjungan cerdas merupakan konsep baru yang patut diapresiasi sebagai sarana meningkatkan keamanan berkendara serta meningkatkan perekonomian di wilayah sekitarnya. “Kendati begitu pembangunan anjungan cerdas

jangan sampai mengakibatkan kemacetan, seperti keberadaan *rest area* kebanyakan,” ujarnya. **Hen/infobpiw**

Tahun 2018, BPIW Terima Pagu Indikatif Rp 248,3 M

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 248,3 Miliar.

Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018 di Jakarta, Kamis (14/9).

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, BPIW memiliki peran strategis dalam pengembangan infrastruktur PUPR di tanah air. "Dalam mekanisme di Kementerian PUPR, BPIW memiliki tugas menyusun perencanaan dan program, seperti membuat MPDP (*masterplan dan development plan,-red*) untuk pengembangan infrastruktur PUPR yang terpadu," ujar Rido.

Adapun teknis perencanaan detail dan pembangunan fisik dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi teknis terkait di

Kementerian PUPR, mulai dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan serta Ditjen Sumber Daya Air.

Ia berharap, Komisi V senantiasa mengupayakan alokasi anggaran yang lebih mengingat tugas-tugas strategis yang diemban BPIW. Lebih lanjut, Rido

memuat misi dan sasaran pembangunan Kementerian PUPR yang menjadi acuan seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR dalam melakukan kegiatan.

"Produk BPIW juga terkait 7 rencana induk pengembangan infrastruktur untuk 7 pulau besar di Indonesia, mulai pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara serta Papua," ucapnya.

Selain itu, ada 35 MPDP Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Kemudian, 12 MPDP kawasan strategis serta 22 MPDP kawasan perkotaan. Kemudian 14 MPDP KPPN (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional *,-red*), serta dokumen keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi program 35 WPS untuk program jangka pendek 3 Tahun dan program tahunan 2015, 2016, 2017, 2018.

Produk BPIW yang lain adalah dokumen kebutuhan pembiayaan infrastruktur wilayah dan kawasan. Kemudian, penyiapan proses kredit World Bank untuk *Integrated Tourism Masterplan* tiga Kawasan Strategis

"Selama dua tahun berdiri, BPIW telah menghasilkan 10 produk strategis yang mengacu pada tugas dan fungsi," jelas Rido.

menjelaskan, selama dua tahun berdiri BPIW telah menghasilkan 10 produk strategis yang mengacu pada tugas dan fungsi. Kesepuluh produk dari BPIW tersebut, seperti Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2015-2019. Renstra Kementerian PUPR 2015-2019



Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas, serta produk berupa dukungan sistem informasi.

Pada 2018, lanjutnya, BPIW akan melakukan beragam penajaman perencanaan dan program, dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis, pagu indikatif tahun anggaran 2018 untuk Kementerian PUPR ditetapkan sebesar Rp 106,9 triliun.

Anggaran itu dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian PUPR sebesar Rp 600 Miliar, Itjen Kementerian PUPR sebesar Rp 104, 9 Miliar, Balitbang Kementerian PUPR sebesar Rp 611, 9 Miliar, BPSDM Kementerian PUPR sebesar Rp 495 Miliar, Ditjen Bina Kontruksi sebesar Rp 338,7 Miliar serta BPIW sebesar Rp 248,3 miliar.

Adapun Ditjen Bina Marga sebesar Rp 41,39 triliun, Ditjen Sumber Daya Air Rp 36,90 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 15,93 triliun,

Ditjen Penyediaan Perumahan mendapat Rp 9,13 triliun, serta Ditjen Pembiayaan Perumahan Rp 259 miliar.

Di tempat sama, Anggota Komisi V DPR RI, Sudjadi mengapresiasi konsep perencanaan

diterima dapat terus meningkat, agar sasaran yang diharapkan dapat benar-benar terwujud.

Anggota Komisi V DPR RI, Sadarestuwati mengatakan, sejumlah inovasi dalam pengembangan infrastruktur wilayah telah dilakukan BPIW. Salah satunya rencana pengembangan jalan selingkar Wilis di Jawa Timur.

Adapun untuk implementasi di lapangannya, lanjut Estu, agar semua pihak memahami dan mendukung pembangunan itu, BPIW perlu menggerakkan sosialisasi di wilayah tersebut.

“Harapannya partisipasi dari pemerintah daerah, masyarakat dan peran swasta dalam pembangunan tersebut,” tegasnya. **(ris/infoBPIW)**

“BPIW akan melakukan beragam penajaman perencanaan dan program, dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,” ujarnya.

pengembangan infrastruktur yang dilakukan BPIW. “Sesungguhnya perencanaannya sudah bagus, tinggal bagaimana agar hal yang telah disusun perencanaannya dapat terwujud dengan baik,” ujarnya.

Ia mengaku, bersama Komisi V akan terus memperjuangkan agar anggaran yang

Pengembangan Infrastruktur Jabar, Diarahkan untuk Keunggulan Kompetitif

Pengembangan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jawa Barat (Jabar) diarahkan pada memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan terhadap keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan pada *Round Table Policy Dialogue (RTPD)* sebagai rangkaian acara Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia (Rakorpusda) Jabar di Bandung, Selasa (26/9).

Menurut Rido untuk mewujudkan pembangunan di Jabar dilakukan melalui peningkatan ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi.

Pembangunan di daerah itu juga dilakukan dengan membangun sistem konektivitas nasional, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan infrastruktur dasar permukiman serta keterpaduan infrastruktur wilayah dan pembinaan konstruksi nasional. Ia menjelaskan, Kementerian PUPR dalam melaksanakan

pengembangan infrastruktur menerapkan strategi pola yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). "Saat ini seluruh wilayah yang ada di Indonesia semuanya telah terkelompokan dalam 35 WPS," tegas Rido.

Untuk mewujudkan pembangunan di Jabar dilakukan melalui peningkatan ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi. Pembangunan di daerah itu juga dilakukan dengan membangun sistem konektivitas nasional

Untuk di wilayah Jawa Barat, ungkap Rido, masuk dalam lingkup 3 WPS, yakni WPS 7 Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi, WPS 8 Jakarta-Cirebon-Semarang dan WPS 9 Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran-Cilacap.

Menurutnya, dalam WPS 7, 8 dan 9 ada jumlah rencana pembangunan ruas jalan

tol untuk menguatkan sistem konektivitas, yakni Soreang-Pasirkoja, Bandung Intra Urban Toll Road/BIUTR, Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Ciawi-Sukabumi, Sukabumi-Ciranjang, Ciranjang-Padalarang, Cimanggis-Cibitung, Cikarang-Tj.Priok, Cileunyi-Nagreg-Tasikmalaya, Tasikmalaya-Ciamis-Banjar, Banjar-Pangandaran, Depok-Antasari, Bogor *Ring Road*, Cinere-Serpong dan Cinere-Jagorawi.

"Selain itu, masih banyak lagi program pengembangan infrastruktur PUPR untuk di WSP 7, 8, dan 9," ujar Rido. Ia juga menambahkan, seperti peningkatan jalan Puncak-Bts. Kota Cianjur, peningkatan struktur jalan batas Banten-Sukabumi-Pangandaran-Batas Cilacap, pembangunan rumah susun Bogor.

Kemudian pembangunan rusunawa di Kab/Kota Tasikmalaya, bantuan stimulan perumahan swadaya, pembangunan Bendungan Ciawi, pembangunan Bendungan Leuwi Keris Tasikmalaya-Ciamis, penanganan kawasan kumuh Kota/Kab Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar dan lainnya.

Rido juga menjelaskan, dalam mengatasi disparitas utara-selatan dilakukan



BPIW dorong pengembangan infrastruktur di Jabar untuk keunggulan kompetitif perekonomian.

Sumber: Dok. BPIW

percepatan pengembangan jaringan jalan nasional dan jalan strategis yang menghubungkan antara pusat-pusat kawasan strategis dan pusat perkotaan antara utara dan selatan.

Kementerian PUPR juga berkomitmen untuk mendukung percepatan pengembangan sosial ekonomi masyarakat Provinsi Jabar Bagian Selatan. "Seperti melalui pembangunan infrastruktur permukiman berupa sanitasi dan perumahan seperti rumah susun dan asrama untuk pondok pesantren," tegasnya.

Di tempat sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar, Iwa Karniwa mengaku, saat ini Pemprov Jabar sedang membangun infrastruktur yang diamanatkan Visi dan Misi Pemprov Jabar.

Selain itu juga dilakukan dukungan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan proyek nasional, seperti jalan tol, bendungan, penyelesaian Bandar Udara Kertajati yang diharapkan lebih besar dari Bandara Soekarno Hatta. Pemprov Jabar juga sedang fokus pada

proyek pelabuhan di Patimban yang mesti diselesaikan, untuk mendukung Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur, lanjutnya, Pemprov Jabar tidak hanya mengandalkan APBN atau APBD karena anggarannya

“Sektor pariwisata memiliki berbagai keunggulan yang dipastikan akan dapat minat investor. Apalagi pariwisata Indonesia jadi penyumbang PDB (produk domestik bruto,-red) , devisa dan lapangan kerja yang paling mudah dan murah,” ungkap Hiramshyah.

terbatas, namun juga menggunakan pendekatan *Business to Business*.

Di tempat sama, Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Hiramshyah 5 Thaib mengatakan, peluang investasi pada sektor pariwisata di Indonesia, khususnya Jabar sangatlah besar. "Sektor pariwisata memiliki berbagai keunggulan

yang dipastikan bakal menarik minat investor. Apalagi pariwisata Indonesia jadi penyumbang PDB (produk domestik bruto,-red) , devisa dan lapangan kerja yang paling mudah dan murah," ungkap Hiramshyah.

Sementara itu, *Asisten* Gubernur BI, Dody Budi Waluyo yang memimpin rapat tersebut mengatakan, hasil rapat tersebut akan menjadi salah satu materi yang akan dibahas lebih lanjut dalam Rakorpusta dalam rangka menggenjot pengembangan ekonomi Jabar.

Hadir pada RTPD tersebut perwakilan dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini juga dihadiri Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian.

Selanjutnya juga ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (DPDPT), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Bank Indonesia. (**ris/infoBPIW**).

Sukseskan IMF-WB AM 2018, Investasi Infrastruktur Krusial di Bali Rp 277 Miliar

Kementerian PUPR terus memacu percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas krusial di Bali. Hal itu guna menyukseskan *International Monetary Fund World Bank Annual Meetings 2018* (IMF-WB AM 2018) atau Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia berlangsung pada November tahun depan.

Rai. Ia menjelaskan, saat ini progresnya dalam pengendalian Kementerian PUPR.

Tahun depan *underpass* tersebut ditargetkan selesai September. Namun Basuki berharap ada percepatan sehingga selesai Juli atau Agustus dengan kualitas kelas dunia.

“Selain *underpass*, ada tiga kegiatan proyek infrastruktur lainnya yang sedang dibangun, yakni pelebaran jalan di Jimbaran-Uluwatu, jalan di Klungkung-Panalokan serta arbitrase batas kota Singaraja menuju Bitani,” ungkap Basuki

“Selain *underpass*, ada tiga kegiatan proyek infrastruktur lainnya yang sedang dibangun, yakni pelebaran jalan di Jimbaran-Uluwatu, jalan di Klungkung-Panalokan serta arbitrase batas kota Singaraja menuju Bitani,” ungkap Basuki yang didampingi Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto.

Hal ini terungkap di sela-sela Rapat Koordinasi Persiapan IMF-WB AM 2018 yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (9/4). Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, salah satu proyek krusial yang dipercepat penyelesaian dari jadwalnya adalah jalan *underpass* Bandara Ngurah

Menurut Basuki, anggaran yang dipersiapkan untuk empat paket proyek infrastruktur krusial di Bali sebesar Rp 277 miliar. “Proyek *underpass* nilainya tertinggi. Totalnya untuk Bali Rp 277 miliar terbagi empat kegiatan. Sedangkan untuk *underpass* mencapai Rp 209 miliar,” kata Basuki.



Diskusi se usai rapat persiapan pelaksanaan IMF-WB AM 2018

Sumber: Dok. BPIW

Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Panjaitan itu dihadiri Menteri Pariwisata, Arief Yahya, perwakilan dari sejumlah kementerian dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

Luhut B. Panjaitan mengapresiasi jajaran Kementerian PUPR yang sigap melakukan akselerasi pembangunan dalam menyelesaikan IMF-WB AM 2018. Ia berharap, beberapa bulan sebelum pelaksanaan IMF-WB AM 2018 pekerjaan infrastruktur PUPR sudah selesai, agar saat pelaksanaannya sudah dapat digunakan dengan baik.

Arief Yahya mengakui, Kementerian Pariwisata terus melakukan promo-promo destinasi wisata yang ada di KSPN. Selain itu, dalam rangka menyambut IMF-WB AM 2018 telah membuat paket-paket wisata ke sejumlah KSPN prioritas. Sebelumnya, Rido Matari Ichwan juga mengatakan,

selain di Bali Kementerian PUPR juga melakukan pembangunan infrastruktur krusial di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). “Di KSPN Danau Toba, kita

Luhut B. Panjaitan mengapresiasi jajaran Kementerian PUPR yang sigap melakukan akselerasi pembangunan dalam menyelesaikan IMF-WB AM 2018

melakukan peningkatan akses jalan Danau Toba-Bandara Sibisa dan lainnya,” ucap Rido.

Selain itu, ada juga peningkatan infrastruktur PUPR di Toraja, Lombok, Labuan Bajo dan Borobudur.

Sebagai informasi, IMF-WB AM 2018

akan dilaksanakan di Bali pada bulan November. IMF-WB AM 2018 merupakan pertemuan tahunan untuk mendiskusikan perkembangan ekonomi dan keuangan global serta rekomendasi kebijakan IMF-WB ke depan.

Acara IMF-WB AM ini diikuti oleh Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara anggota IMF-WB, pimpinan dan staf IMF-WB, para pelaku utama sektor keuangan, akademisi, CSC/NGO, pers dan observer. Diperkirakan peserta yang akan hadir lebih dari 15.000 orang. ([ris/infoBPIW](#))

Mengangkat Perekonomian Desa Melalui Pengembangan KPPN



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, sejak 2015 hingga 2017 telah menyusun masterplan dan development plan (MPDP) untuk 26 Kawasan Perdesaan Strategis (KPS) serta MPDP pada 14 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Langkah ini dilakukan untuk mendukung KPPN.

Dokumen MPDP tersebut merupakan perencanaan dan pemrograman yang menjadi arah kebijakan dan strategi pembangunan perdesaan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat, menciptakan desa yang mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, ekologi, serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi desa-kota.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, capaian pada tahun 2015 tersusun 26 MPDP, yaitu MPDP 6 KPS di Pulau Sumatera, meliputi Kawasan Juli, Dolok Masihul, Toapaya, Mandeh, Pulau Rimau, Sukadana.

Kemudian, MPDP 5 KPS di Pulau Kalimantan, meliputi Kawasan Segedong, Mentarang, Kuala Kurun, Halong, Loa Kulu. Ada juga 4 MPDP KPS di Kepulauan Nusa Tenggara, meliputi Kawasan Sakra, Tambora, Kelimutu, Wini.

Selain itu, MPDP 5 KPS Pulau Sulawesi, meliputi Kawasan Likupang, Olele, Napu, Ladongi, Malino. Kemudian juga ada MPDP KPS Trenggalek dan MPDP 5 KPS Kawasan Periurban yang meliputi Kawasan Lembang, Pleret, Tumpang, Kediri, dan Tampaksiring.

“Pada tahun 2016, tersusun 14 MPDP Kawasan KPPN, dimana 4 diantaranya disusun BPIW Kementerian PUPR, yakni Tabanan, Praya, Labuan Bajo, dan Daruba. Adapun sisanya ditangani oleh Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Agraria dan Penataan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN),” papar Rido.

Tahun 2017, lanjutnya, telah tersusun 20 MPDP KPPN, yang 10 diantaranya disusun BPIW Kementerian PUPR, di Kabupaten

Toba Samosir, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Banjar, Kabupaten Berau, Kabupaten Dompus, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Luwu Timur.

“Adapun 10 sisanya, ditangani Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Agraria dan Penataan Ruang/ BPN,” jelas Rido.

“Pada tahun 2016, tersusun 14 MPDP Kawasan KPPN, dimana 4 diantaranya disusun BPIW Kementerian PUPR, yakni Tabanan, Praya, Labuan Bajo, dan Daruba. Adapun sisanya ditangani oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Agraria dan Penataan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN),” papar Rido.

Dukungan infrastruktur PUPR dalam pengembangan KPPN, menurut Rido, perlu diprioritaskan skala kebutuhannya. Posisi dukungan infrastruktur PUPR terhadap pengembangan KPPN tersebut dapat berada di depan atau di pertengahan tahun.

Rido menegaskan perencanaan pengembangan infrastruktur PUPR di KPPN harus berjalan efektif. Selain itu menurutnya dukungan infrastruktur PUPR perlu didorong agar taraf hidup masyarakat di





Irigasi Saddang Sulawesi Selatan

Sumber: Dok. PUPR

perdesaan dapat lebih meningkat. “Artinya kalau dahulu menjual hasil pertanian itu, dijual saja ke pasar setelah panen. Ke depan diharapkan ada hal-hal yang dapat diolah dahulu, agar terdapat peningkatan nilai tambah,” terangnya.

Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan pengembangan dan penguatan 40 KPPN. Program tersebut didukung sepenuhnya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Dukungan dari Kementerian PUPR yakni dimulai dari penyusunan dokumen masterplan dan development plan (MPDP-red) kawasan KPPN hingga pelaksanaan pembangunan infrastrukturnya,” terangnya.

Dokumen MPDP merupakan dokumen kesepakatan dan acuan bersama

para pemangku pembangunan, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, BPIW, Sanusi

Rido menegaskan perencanaan pengembangan infrastruktur PUPR di KPPN harus berjalan efektif. Selain itu menurutnya dukungan infrastuktur PUPR perlu didorong agar taraf hidup masyarakat di perdesaan dapat lebih meningkat

Sitorus mengatakan, proses penyusunan MPDP KPPN disusun melalui beberapa tahapan, seperti survei lapangan dan koordinasi awal. Kemudian, kunjungan lanjutan untuk penajaman informasi kawasan. Tahap berikutnya dilakukan diskusi dan rapat koordinasi yang dilakukan para

pemangku kepentingan untuk menjaring masukan dari daerah, guna penyempurnaan draft MPDP yang tengah disusun.

Adapun konsep yang diusung adalah untuk meningkatkan nilai tambah potensi di KPPN dan perdesaan-perdesaan di sekitarnya. Digelarnya diskusi serta rapat koordinasi diharapkan tercipta kesamaan persepsi dalam upaya mengembangkan KPPN, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar sesuai harapan.

Selain itu, BPIW juga menginisiasi penandatanganan kesepakatan 5 Kementerian dalam penyusunan MPDP KPPN

Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPTT), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta



Rapat pembahasan KPPN

Sumber: Dok. BPIW

“Masterplan juga menjadi acuan implementasi pembangunan kawasan perdesaan bagi Pemerintah Pusat serta pihak terkait,” papar Agusta.

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Jakarta. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Agusta Ersada Sinulingga menyatakan, pengembangan kawasan perdesaan diselenggarakan melalui peningkatan keterkaitan pembangunan kota-desa.

koordinasi Kementerian Koordinator PMK dan Bappenas.

Menurut Agusta MPDP yang disusun akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

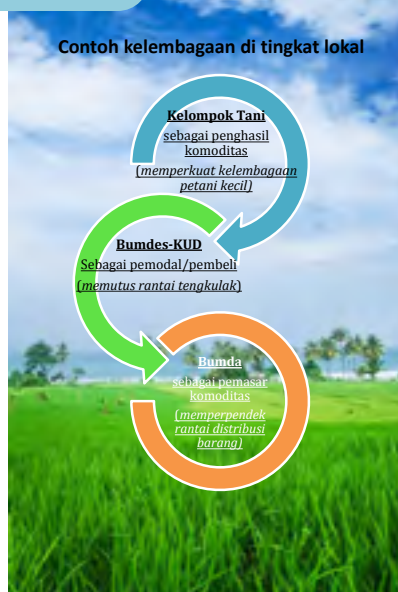
pihak terkait,” papar Agusta. Pada tahun 2018, Ditjen Cipta Karya melalui Direktorat Bagkim telah berkomitmen mendukung pengembangan KPPN melalui penggelontoran anggaran untuk 30 lokasi KPPN. **Tim Redaksi**

MPDP KPPN disusun secara partisipatif dan difasilitasi Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Kementerian Desa PDTT di bawah

“Masterplan juga menjadi acuan implementasi pembangunan kawasan perdesaan bagi Pemerintah Pusat serta

Keberlanjutan Pengembangan KPPN

1. Dalam menjaga keberlanjutan pengembangan kawasan perdesaan, **tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pembangunan infrastruktur** yang berakhir setelah masa konstruksi dan pemeliharaan (3-6 bln).
2. **Dibutuhkan pembangunan yang bersifat non-fisik** (penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, integrasi teknologi, dll) juga dukungan penuh Pemerintah Daerah
3. **Dibutuhkan tim monitoring pertumbuhan KPPN** di tingkat pusat dan daerah (diselaraskan dengan Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan (TKPKP))



Pengembangan Wilayah Berbasis Teknologi

(Bagian 2)



Dr. Doedoeng Zenal Arifin, ST, MT

*Kepala Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan
Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW*

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR adalah unit yang baru dibentuk di lingkungan Kementerian PUPR yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dengan tugas yang cukup penting tersebut, maka sudah seharusnya BPIW memiliki sistem kerja yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas itu. Dengan kata lain, bahwa ketika BPIW melakukan sinergi dan keterpaduan dengan unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR, maupun dengan kementerian maupun lembaga lain, maka sudah semestinya antar unit kerja di BPIW melakukannya terlebih dahulu. Sebab, bagaimana BPIW bisa melakukan sinergi dengan pihak lain, kalau dalam unit kerja BPIW sendiri tidak melakukan sinergi.

*tulisan ini hanya opini pribadi penulis dan bukan merupakan pernyataan resmi institusi

A. Konsep Dasar Pengembangan Wilayah yang Berbasis Teknologi

Perencanaan pembangunan wilayah berbasis teknologi (*technology-based development planning*) adalah perangkat perencanaan pengembangan wilayah yang menitikberatkan perencanaan pada pengelolaan komponen-komponen teknologi yang ada di suatu wilayah melalui proses transformasi sumberdaya di wilayah yang bersangkutan (Alkadri, 1999).

Sumber daya adalah segala potensi/ keunggulan yang dimiliki suatu daerah, baik sumberdaya alamnya, sumberdaya manusianya, keuntungan lokasinya, kelembagaan yang mendukung, kebijakan-kebijakan yang bersinergi, infrastruktur dan lain-lain.

Komponen teknologi dalam konteks pengembangan wilayah dapat dipergunakan untuk memilah-milah jenis teknologi adalah merupakan suatu alternatif yang universal. Adapun komponen teknologi yang dimaksud adalah (Alkadri, 1999):

- (1) *Technoware (T) = object-embodied technology = facilities* : mencakup peralatan, perlengkapan, mesin-mesin, kendaraan bermotor, pabrik, dan infrastruktur fisik.
- (2) *Humanware (H) = person-embodied technology = abilities*: meliputi pengetahuan, keterampilan / keahlian, kebijaksanaan, kreativitas, prestasi, dan pengalaman seseorang atau sekelompok orang.
- (3) *Infoware (I) = document-embodied technology = facts*: berkaitan dengan proses, prosedur, teknik, metode, teori, spesifikasi, observasi, dan fakta-fakta lainnya yang diungkapkan melalui publikasi, dokumen-dokumen, dan cetak biru.

- (4) *Orgaware (O) = institution-embodied technology = frameworks*: dibutuhkan untuk mewedahi fasilitas, kemampuan, dan fakta, yang terdiri dari praktik-praktik manajemen, keterkaitan, dan pengaturan organisasi (kelembagaan dan regulasi).

Penilaian jenis teknologi sering tidak universal dan beragam, ada yang membaginya menjadi teknologi tinggi (*high technology*) dan teknologi rendah (*low technology*). Ada pula yang menilainya menjadi teknologi tradisional (*traditional technology*) dan teknologi modern (*modern technology*). Kemudian ada lagi yang mengkategorikan menjadi teknologi padat modal (*capital intensive technology*) dan teknologi padat karya (*labor intensive technology*).

Penilaian jenis teknologi sering tidak universal dan beragam, ada yang membaginya menjadi teknologi tinggi (*high technology*) dan teknologi rendah (*low technology*).

Berdasarkan sifatnya, teknologi dipilah menjadi tiga klasifikasi, yaitu teknologi maju, teknologi adaptif dan teknologi protektif (Hadi Prayitno dan Budi Santosa, 1996):

- (1) *Teknologi maju* adalah teknologi yang dipersiapkan untuk menghadapi persoalan yang besar untuk suatu bangsa dalam perkembangan masa depan. Misalnya teknologi yang menyangkut sumber energi, nuklir, teknologi angkasa, laut dan darat.
- (2) *Teknologi adaptif* merupakan teknologi yang bersumber pada penelitian dan pengembangan teknologi di negara-negara maju yang disesuaikan dengan pertimbangan karakteristik setempat. Misalnya pengembangan bibit unggul, teknik bangunan dan teknologi pascapanen.
- (3) *Teknologi protektif* adalah teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk memelihara dan mengamankan ekologi dan lingkungan hidup masa depan, baik yang berkaitan dengan konservasi,



Ilustrasi Teknologi...Opini edisi 21.

restorasi, maupun regenerasi sumberdaya alam. Unsur pokok dalam teknologi protektif antara lain adalah peningkatan kelestarian, pemulihan kesuburan tanah yang tandus, pemanfaatan lahan tidur, dan sebagainya.

Berdasarkan unsur pokok tersebut, dapat dinyatakan bahwa teknologi protektif merupakan teknologi yang dimaksudkan untuk melindungi fungsi keseimbangan ekosistem, atau dengan kata lain bisa diartikan sebagai teknologi perlindungan lingkungan.

Sedangkan proses transformasi sumber daya mencakup tiga elemen utama, yakni (Alkadri, 1999):

- (1) *Input*; yang terdiri dari sumber daya alam atau *natureware* (seperti sumberdaya geofisik, sumberdaya mineral, dan sumber daya hayati) dan barang-barang antara atau *semiware* (seperti bahan-bahan kimia).
- (2) *Output*; baik berupa barang-barang konsumsi atau *consumware* (seperti makanan, obat-obatan, pakaian dan alat-alat rumah tangga), barang-barang antara, dan barang peralatan atau *technoware* (seperti peralatan, mesin pabrik, perlengkapan, dan kendaraan bermotor).
- (3) *Teknologi*; yang berfungsi sebagai perubah atau pentransformasi input menjadi output berdasarkan empat komponen yang dimilikinya (*technoware, humanware, infoware, dan orgaware*).

Ada lima alat analisis utama yang memainkan peranan penting dalam konsep *technology-based development planning*. Kelima alat analisis tersebut berjenjang sesuai dengan transformasi yang ada, yaitu (Alkadri, 1999) :

- (1) Analisis Kandungan Teknologi (*Technology Content*) pada level perusahaan.
Analisis kandungan teknologi merupakan analisis kinerja kontribusi teknologi dalam proses transformasi input menjadi output di suatu wilayah.
Kegunaan dari analisis ini adalah untuk menilai kinerja tingkat pengembangan, pemanfaatan, penguasaan dan pemasyarakatan teknologi di suatu wilayah. Berdasarkan kinerja yang diperoleh, dapat dirumuskan secara lebih terarah upaya-upaya perbaikan yang perlu ditempuh guna meningkatkan kinerja proses transformasi sumberdaya di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Analisis Status Teknologi (*Technology Status*) pada level industri/sektoral.
Analisis ini bermanfaat untuk mengkaji tingkat perkembangan teknologi suatu industri/ sektor sebuah perekonomian wilayah dalam memacu pengenalan teknologi bagi peningkatan produktifitas dan daya saing. Adanya perbedaan status teknologi antar industri/ sektor atau antar wilayah dapat menjadi langkah awal untuk merumuskan rencana pengembangan teknologi.
- (3) Analisis Iklim Teknologi (*Technology Climate*) pada level perusahaan, industri/ sektor, maupun wilayah.

Analisis kemampuan teknologi berguna untuk menggambarkan kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan/ wilayah dalam mengelola sumberdaya maupun infrastruktur kelembagaan.

Dalam proses transformasi, perubahan input menjadi output akan menjadi lebih baik apabila dimasukan pula kajian mengenai iklim teknologi. Iklim teknologi dapat dikuantifikasi dengan menggunakan indikator indeks iklim teknologi. Ada tujuh faktor yang mempengaruhi iklim teknologi di suatu wilayah, yaitu :

- a. Tingkat perkembangan sosial ekonomi.
 - b. Status infrastruktur fisik dan jasa penunjang.
 - c. Ketersediaan tenaga IPTEK dan institusi penelitian dan pengembangan.
 - d. Skenario IPTEK dalam sistem produksi.
 - e. Skenario IPTEK visi Perguruan Tinggi.
 - f. Kemajuan dan upaya di bidang spesialisasi tertentu.
 - g. Komitmen pemerintah untuk pengembangan IPTEK.
- (4) Analisis Kemampuan Teknologi (*Technology Capability*) pada level wilayah / sektoral.

Analisis kemampuan teknologi berguna untuk menggambarkan kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan/ wilayah dalam mengelola sumberdaya maupun infrastruktur kelembagaan. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan tersebut dapat dijadikan suatu pertimbangan untuk menyusun program-program pembangunan berbasis teknologi.

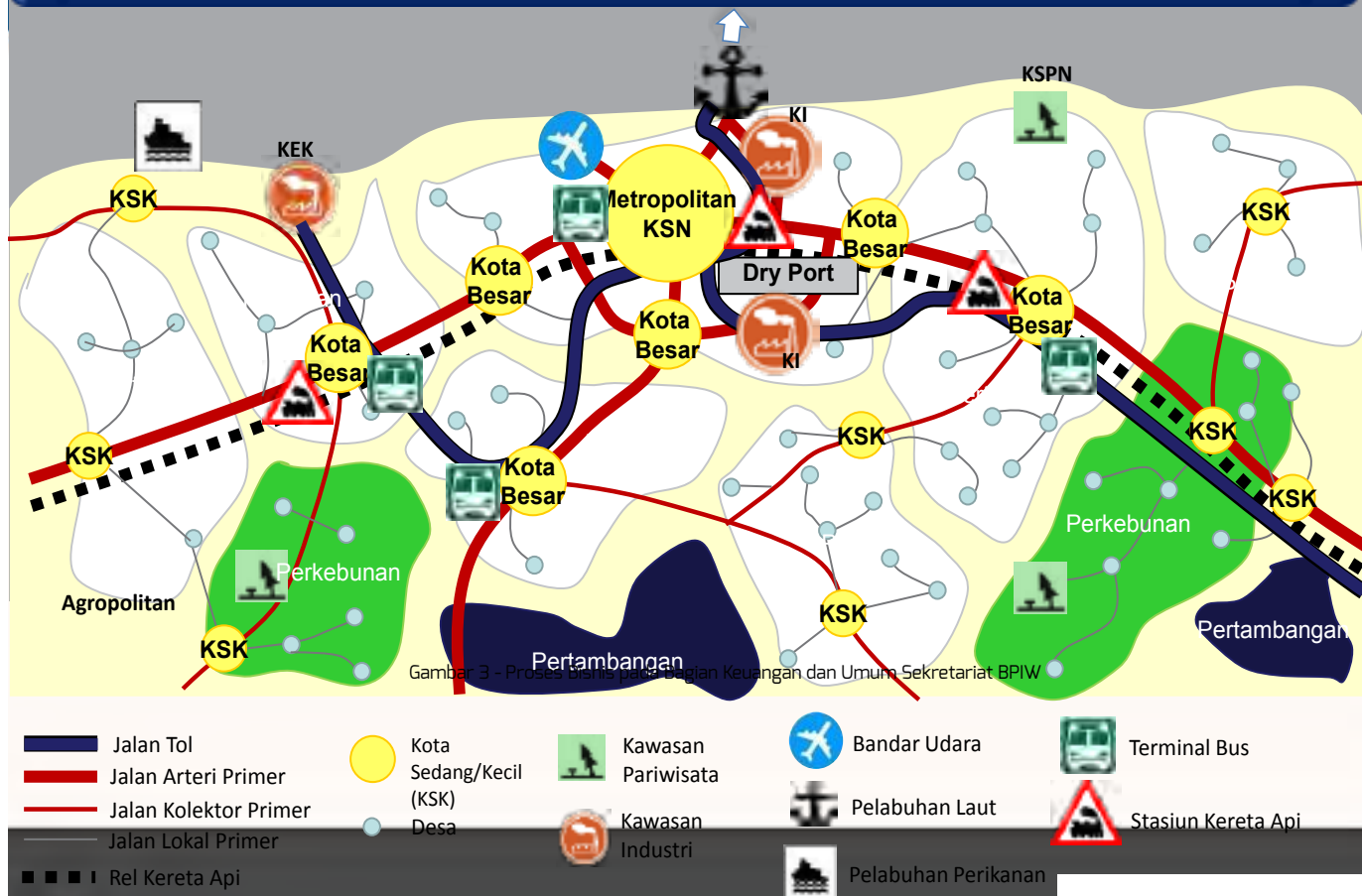
- (5) Analisis Kebutuhan Teknologi (*Technology Needs*) pada level wilayah/ sektoral.
Berdasarkan hasil analisis mengenai kandungan, status, iklim, dan kapabilitas di atas, dapat dirancang kebutuhan-kebutuhan akan teknologi. Pemenuhan kebutuhan tersebut bisa berbentuk teknologi impor, teknologi ekspor, atau gabungan keduanya. Metoda pengkajian kebutuhan teknologi bermanfaat dalam beberapa hal berikut :
 - a. Perencanaan pembangunan sektoral/ wilayah berbasis teknologi.
 - b. Peramalan teknologi dengan cara memonitor perkembangan teknologi intenasional.
 - c. Perencanaan pencapaian keseimbangan perdagangan berdasarkan konteks kandungan teknologi.
 - d. Memperkuat keterkaitan antara aparat pemerintah dan masyarakat IPTEK dalam penyusunan perencanaan pembangunan berbasis teknologi.

B. Strategi Pemilihan Teknologi

Setelah kebutuhan teknologi dapat diindikasi, maka selanjutnya dalam perencanaan pengembangan wilayah yang berbasis teknologi, adalah menetapkan strategi pemilihan teknologi. Ada tiga pilihan strategi, yaitu (Alkadri, 1999):

- (1) Strategi membuat sebagian (*Make-some Strategy*) :
Strategi membuat sebagian teknologi dalam rangka pengembangan wilayah, dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu

KOTA SEBAGAI MESIN PERTUMBUHAN WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (WPS)



memacu inovasi, meningkatkan keterkaitan teknologi dengan sumberdaya manusia, dan mengembangkan sumberdaya manusia.

(2) Strategi membeli sebagian (*Buy-some Strategy*):

Strategi membeli sebagian teknologi yang dibutuhkan, dapat dilakukan melalui pendekatan tentang penguasaan teknologi, alih teknologi dan modifikasi teknologi. Mengingat pendekatan ini akan menyerap biaya yang besar, maka hal yang perlu diperhatikan adalah adanya sinkronisasi dengan persoalan-persoalan pembangunan lainnya yang membutuhkan anggaran yang juga cukup besar.

(3) Aliansi Strategis (*Strategic Alliances*):

Aliansi atau kerjasama strategis merupakan suatu strategi pengembangan bisnis yang utama akhir-akhir ini. Dalam upaya pengembangan wilayah, aliansi strategis dapat ditempuh pada level perusahaan/ industri maupun pemerintahan.

Untuk mempercepat tercapainya daya saing wilayah, aliansi strategis diterapkan untuk tujuan-tujuan berikut:

- Mengidentifikasi dan mengakses teknologi dan kompetensi baru
- Meningkatkan pangsa pasar secara cepat dan efisien
- Membangun spesialisasi dan
- Mencapai keunggulan biaya.

Strategi pemilihan teknologi mana yang dapat dipilih dari ke tiga macam strategi di atas, akan sangat bergantung pada kesiapan visi, misi dan strategi yang dimiliki wilayah yang bersangkutan.

C. Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)

Pendekatan pengembangan wilayah di Indonesia terus dilakukan penyesuaian seiring koreksi terhadap pendekatan yang

dilaksanakan. Sebelumnya, muncul kesadaran bahwa pendekatan pembangunan yang bersifat sektoral dan parsial kerap mengakibatkan inefisiensi pembangunan, seperti duplikasi kegiatan serta konflik antarsektor dan daerah.

Pendekatan pengembangan wilayah di Indonesia terus dilakukan penyesuaian seiring koreksi terhadap pendekatan yang dilaksanakan.



Pendekatan pengembangan wilayah yang diterapkan terus berevolusi dari pendekatan yang bertumpu pada pendekatan ekonomi wilayah kemudian berkembang dengan mengintegrasikan pendekatan fisik dan infrastruktur, kelembagaan, manajemen dan lingkungan seiring dengan pemanfaatan teknologi mutakhir.

McCall menunjukkan bahwa semenjak akhir abad ke 20, pengembangan wilayah menjadi berbasis multi disiplin dari teknik/ rekayasa, ilmu politik, kebijakan publik dan sosiologi di samping ilmu ekonomi. Multi disiplin ini lebih fokus pada pemikiran tentang seharusnya seperti apa suatu wilayah dan bagaimana berbagai faktor membentuk konsepsi suatu wilayah.

Selanjutnya, McCall menyatakan bahwa pada abad ke 21, ekonomi geografi telah menambah multi disiplin dan fokus pengembangan wilayah bergeser lebih pada dinamika spasial (ruang), suatu wilayah sebagai tempat tinggal, bekerja dan investasi.

Selanjutnya, teori-teori baru dari pengembangan wilayah fokus pada kapital manusia dan sosial, inovasi teknologi, dan dinamika spasial (demographic change). Pendekatan ini didasari pada pentingnya perencanaan dan pemrograman yang terpadu. Konsep di atas kemudian mengkristal menjadi konsep yang kita kenal sekarang ini yaitu wilayah pengembangan strategis (WPS). Pembangunan berbasis WPS merupakan suatu pendekatan pembangunan yang:

- 1) memadukan antara pengembangan wilayah dengan "market driven", ini berarti teknologi menjadi penghela yang signifikan.
- 2) mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, lagi-lagi teknologi sangat berperan dalam memastikan daya dukung dan daya tampung secara efisien.
- 3) memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis
- 4) mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan di WPS
- 5) mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS.

Pada dasarnya strategi keterpaduan pengembangan kawasan dan Infrastruktur PUPR melalui konsep Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS adalah varian pendekatan pengembangan wilayah berbasis teknologi, khususnya dalam konteks pengembangan kawasan tematik seperti kawasan industri (KI), kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan pelabuhan, kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), dan seterusnya.

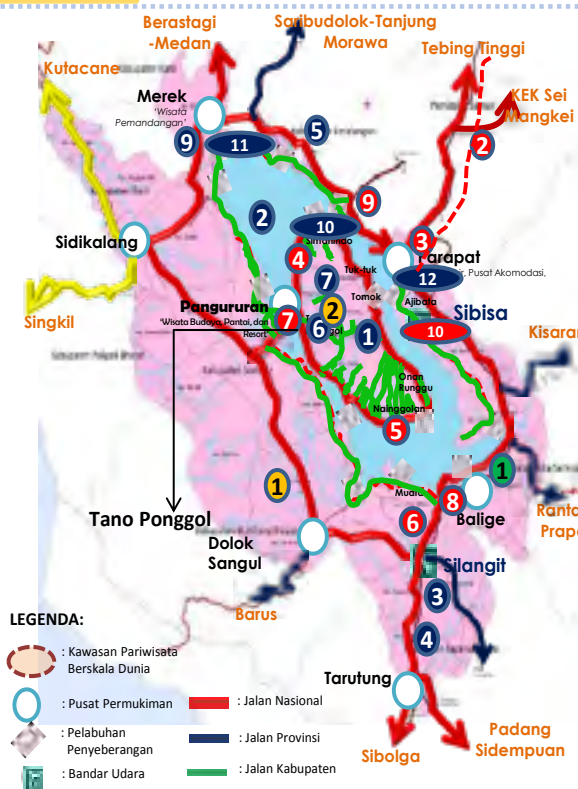
Seperti disebutkan di atas, pengembangan berbasis WPS merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memadukan antara pengembangan wilayah dengan "market driven", sesuai daya dukung dan daya tampungnya dengan fokus pengembangan infrastruktur di kawasan pertumbuhan/ untuk mendukung penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan pemanfaatan teknologi yang tepat sesuai dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis teknologi.

Dengan demikian, dibutuhkan rencana terpadu antara infrastruktur dengan perkotaan strategis sesuai dengan hirarkinya (metropolitan, perkotaan sedang, perkotaan kecil, perdesaan) dengan tematik jasa metropolitan, KEK, KSPN, KI, kawasan perbatasan, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), lumbung pangan. Sedangkan, program sinkronisasi infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan sinergi terkait fungsi, lokasi, waktu, besaran, dan dana.

Hal ini dimaksudkan agar wilayah tersebut dapat berkembang menjadi wilayah yang kawasan pertumbuhan/ perkotaannya saling terhubung, sebagai strategi untuk meningkatkan/ menciptakan spesialisasi, komplementaritas (saling isi), sinergi dan skala ekonomi dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang makin efisien.

Salah satu produk yang dihasilkan BPIW adalah *Development Plan* destinasi wisata Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara 2015-2019. Beberapa pembangunan infrastruktur PUPR yang mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) tersebut seperti pembangunan Jalan Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi dan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Timuran Syahuda di Kabupaten Simalungun. Selain itu juga akan dikembangkan kawasan permukiman baru sebagai *homestay* dan Penataan Kawasan Tomok Kabupaten Samosir.

DEVELOPMENT PLAN DESTINASI WISATA DANAU TOBA TAHUN 2015-2019



1. Pembangunan Jalan TOL Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi (MYC)
2. Pembangunan Jalan TOL Tebing Tinggi – Siantar – Parapat (MYC)
3. Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Tebing Tinggi-P. Siantar-Parapat (Jalan Lingkar Luar Parapat) (MYC)
4. Preservasi dan Pelebaran Jalan Pangururan - Ambarita - Tomok - Lagundi - Onan Runggu (MYC)
5. Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Pangururan - Nainggolan - Onan Runggu (MYC)
6. Rekonstruksi Jalan Sp. Bandara Silangit – Muara
7. Pembangunan Jembatan Tano Ponggol di Kab. Samosir (MYC)
8. Pembangunan Jalan By Pass lingkaran luar (Longat – Tambunan 10,1 km) di Kota Balige (MYC)
9. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer Tigaras – pematang Siantar (MYC)
10. Jalan Akses Bandara Sibisa (Aek Natolu – Sibisa sepanjang 2,5 Km) (MYC)

1. Peningkatan embung Aek Natonang di Kabupaten Samosir (konstruksi) (MYC)
2. Pemeliharaan/Pembersihan Danau Toba (Eceng Gondok) (MYC)
3. Pembangunan Bendung dan Jaringan Di. Sidilanitono 2.420Ha, Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara (MYC)
4. Perbaikan Tanggul Aek Sigeaon di Kec. Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara
5. Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Timuran Syahuda; Kab. Simalungun; 14,3 Km; 0,050 M3/ Det
6. Normalisasi Saluran Tanah Ponggol (MYC)
7. Pembangunan Embung di Kab. Samosir (Pea Nauli Parsinagaan, Pea Rihit, Pea Tahoran, Pea Nadea, Julu Ni Aek) (MYC)
8. Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Pariwisata Danau Toba
9. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Paya Lahlah Kab. Karo(4000 Ha)
10. Perbaikan Alur Sungai Binanga Bolon Desa Sakkal, Kec. Simanindo (5 Km)
11. Perbaikan Saluran drainase di Kab. Karo 19 Km
12. Optimalisasi sarana prasarana penyediaan dan pengelolaan airbaku Kab Simalungun

1. Pembangunan rumah susun mahasiswa 114 unit, 5 lantai, tipe di Sekolah Teknologi Del Tapanuli Tengah, Kec Laguboti, Kab. Toba Samosir
2. Pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya 1050 unit
3. Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai *homestay*

1. Pembangunan Sanimas di Kab. Dairi, Kab. Simalungun, dan Humbang Hasundutan (konstruksi – kontrak)
2. Penataan Kawasan Tomok Kabupaten Samosir (KSPN Danau Toba)
3. Penyediaan prasarana air limbah bagi masyarakat di daerah kumuh padat perkotaan
4. Penyusunan RTBL Kws. Ajobata Kab. Toba Samosir
5. Penyusunan RTBL Kws. Tomok - Tuktuk Siandong Kab. Samosir
6. Penanganan Sektor Limbah di Kab. Samosir dan Kab. Tobasa



Mengunjungi Keanekaragaman Hayati di Gugusan Kepulauan Raja Ampat

Nama 'Raja Ampat', tentunya tidak asing lagi jika kita sangat mencintai pulau-pulau yang ada di Indonesia. Raja Ampat merupakan primadona dan surga di Indonesia. Kepulauan Raja Ampat merupakan rangkaian dari empat gugusan pulau utama yang berada di Pulau Waigeo, Pulau Misol, Pulau Salawati dan juga Pulau Batanta.

Kini, Raja Ampat menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup terkenal di kalangan para wisatawan baik lokal bahkan mancanegara, terutama bagi para wisatawan yang selalu menikmati indahnya pemandangan bawah laut. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Kepulauan Raja Ampat terletak di ujung barat pulau Papua, tepatnya sekitar 50 mil di sebelah barat laut Sorong.

Sementara dalam konsep pembangunan infrastruktur PUPR berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), Kota Sorong masuk dalam WPS 31 yakni Sorong-Manokwari.

Pulau di Raja Ampat sangat luas, karena mencakup 4,6 juta hektar tanah dan laut, terdapat rumah bagi 540 jenis karang, 1.511 spesies ikan dan juga 700 jenis moluska. Dengan kekayaan yang ada, Raja Ampat

menjadi perpustakaan hidup, karena memiliki koleksi terumbu karang dan biota laut paling beragam di dunia. Bahkan menurut *The Nature Conservancy dan Conservation International*, terdapat 75 persen spesies laut dunia yang berada di pulau ini. Adapun beberapa tempat yang wajib dikunjungi ketika kita berada di Raja Ampat antara lain: **Pulau Pianemo, Pulau Wayag, Desa Wisata Arborek, dan juga Batu Pensil.**

Raja Ampat menjadi perpustakaan hidup, karena memiliki koleksi terumbu karang dan biota laut paling beragam di dunia

Pulau pianemo

Pulau ini merupakan salah satu kawasan yang berada di Distrik Waigeo Barat ini merupakan sebuah pulau yang menyimpan sejuta pesona keindahan alam bahari yang sangat disayangkan jika dilewatkan. Disinilah kita benar – benar dapat melihat dan menikmati keindahan pulau – pulau karang dan juga pemandangan yang menakjubkan. Gugusan bukit karst yang terhampar di kawasan ini membentuk gugusan pulau karang di Pianemo lebih kecil. Oleh karena

itulah masyarakat di sekitar pianemo selalu menyebut Pianemo sebagai pulau wayag mini. Bukit-bukit karang yang terjal, selalu tumbuh dan bukit tersebut semakin meninggi di tiap tahunnya.

Ada tiga bukit yang biasa dijadikan sebagai jalur trek di pulau ini yakni bukit berketinggian sekitar 15 meter di Tanjung Bintang, Bukit Gundul yang memiliki ketinggian 30 meter dan yang paling tertinggi adalah 40 meter.

Pulau yang terletak di Desa Pam ini dapat ditempuh dengan perjalanan sekitar enam jam melalui jalur laut, namun pulau Pianemo ini relatif mudah dijangkau dikarenakan dari pelabuhan waisai yang merupakan pusat administrasi kabupaten Raja Ampat, perjalanan ke pulau Pianemo ini dapat ditempuh sekitar 2 hingga 3 jam dengan *speed boat*.

Pulau Wayag

Salah satu tempat yang menarik lagi untuk dikunjungi di Papua Barat yakni pulau Wayag. Wayag merupakan salah satu ikon wisata bahari di Raja Ampat yang merupakan bagian dari gugusan kepulauan Raja Ampat yang terkenal dengan keindahannya ini dinilai memiliki spot yang paling mengagumkan. Pulau Wayag yang memiliki ratusan karst



dan batu kapur berhutan lebat ini merupakan pulau terjauh dari Raja Ampat.

Oleh karena itu, jika kita akan berpergian ke pulau ini, harus dan wajib untuk mengunjungi destinasi ini, terlebih jika kita ingin mendapatkan foto atau pemandangan yang indah, kita harus menuju puncak bukit yang bisa ditempuh selama satu hingga dua jam mendaki di karang keras, bahkan kita harus melewati jalan yang curam hingga kemiringan 90 derajat. Dari puncak inilah kita bisa melihat seluruh pemandangan yang ada di Raja Ampat. Tidak hanya itu, dari atas kapal pun kita dapat menemukan banyak ikan dan biota laut yang sangat indah.

Kampung Wisata Arborek

Desa wisata ini merupakan sebuah desa wisata yang terletak di sebuah pulau kecil di Meos Mansar, Raja Ampat, Papua Barat. Desa ini merupakan sebuah desa percontohan di daerah Raja Ampat Papua. Desa ini merupakan desa pelopor diantara 18 desa dalam konservasi lokal kekayaan laut yang berbasis masyarakat. Arborek diberkahi dengan kekayaan dan keindahan laut yang sangat indah.

Tidak hanya pasir putih halus dan rimbunnya pohon kelapa hijau menghiasi pulau kecil ini, akan tetapi keramahan penduduknya juga membuat kita sangat nyaman ketika berkun-

jung di Desa wisata Arborek ini. Akan tetapi, Di kampung Arborek ini, memiliki dua buah zona larangan Kawasan Konservasi Laut Daerah atau zona larangan bagi siapapun untuk mengambil hasil laut demi menjaga kelestarian biota laut diwilayah tersebut. Lebih jelasnya daerah perlindungan laut yang dimiliki kampung Arborek yaitu:

- a. DPL Indip seluas 34 Ha, dimana letaknya di sebelah barat laut dari kampung Arborek
- b. DPL Mambarayup, seluas 68,7 Ha, dimana letaknya disebelah tenggara dari kampung Arborek

Nah setelah mengetahui larangan – larangan tersebut tentunya kita harus bisa menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kampung Arborek, terlebih jika kita mengunjungi kampung tersebut.

Batu Pensil

Batu Pensil juga merupakan sebuah lkon unik teluk Kabui di pulau Raja Ampat. Nama batu pensil merupakan salah satu gugusan pulau karang seperti halnya pulau lain disekitarnya. Karena bentuknya yang unik, maka pulau ini menjadi sorotan seluruh wisatawan dan terkenal hingga akhirnya menjadikan tempat ini sebagai salah satu obyek yang wajib dikunjungi ketika kita mengunjungi Raja Ampat. Batu pensil ini memiliki bentuk berupa batu raksasa yang

berdiri tegak hingga pemerintah daerah Raja Ampat bersama warga setempat berinisiatif untuk membuat dermaga kecil di Batu Pensil dan beberapa pulau karang di sekitarnya.

Bagi kita yang akan mengunjungi Batu Pensil ini, kita dapat menempuh perjalanan menuju kawasan batu pensil kurang lebih 1 jam dari pelabuhan pariwisata Waisai dengan speedboat. Jangan lupa ketika kita sudah tiba di Batu Pensil ini, untuk dapat mengabadikan moment di tengah-tengah langit merona, dengan birunya pemandangan dengan awan-awan yang sangat menarik untuk difoto.

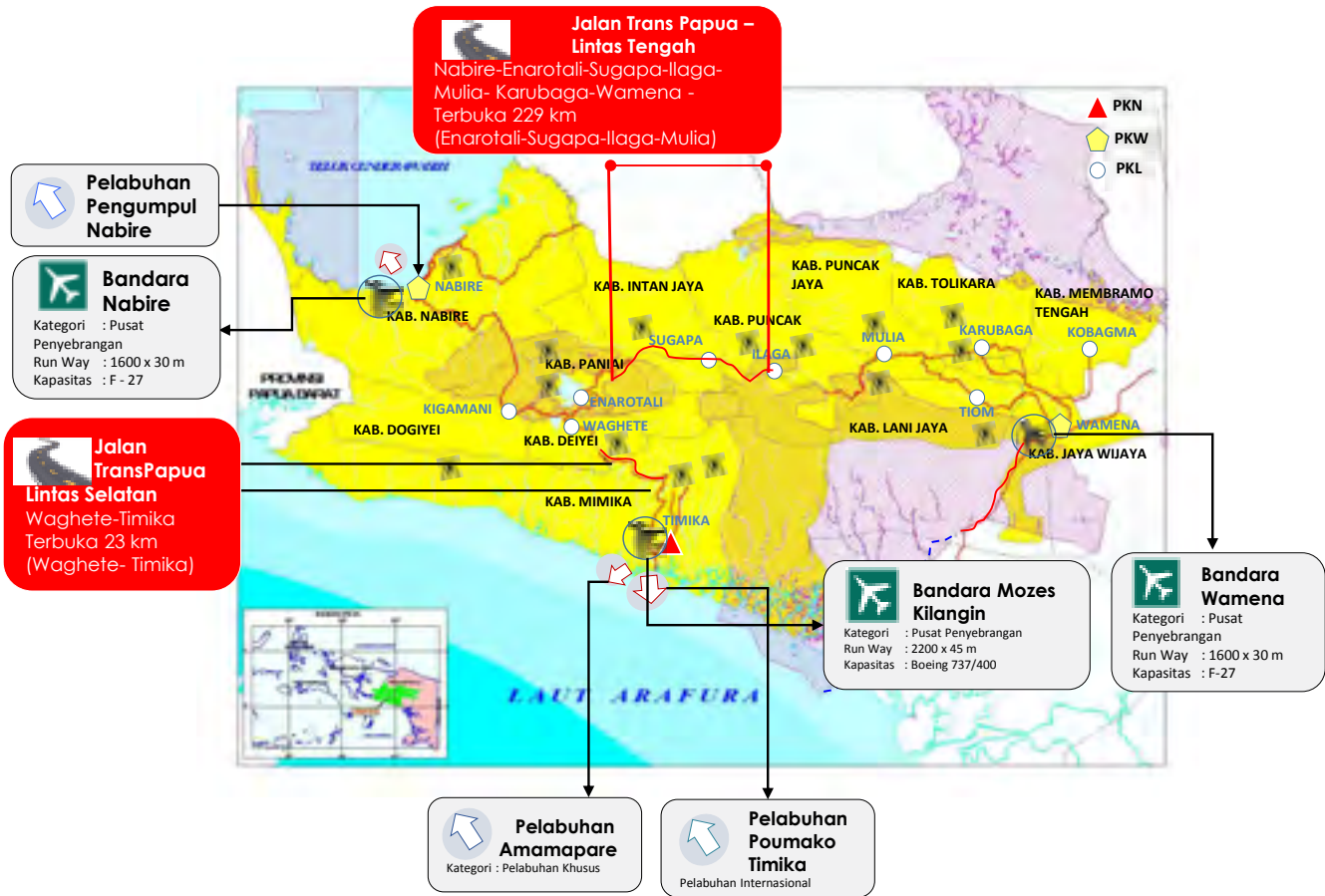


Batu Pensil Teluk Kabui Raja Ampat

Foto-foto: Anas/BPIW

Wilayah Pengembangan Strategis 33 NABIRE – ENAROTALI – WAMENA

ULTIMATE WPS 33 NABIRE-ENAROTALI-WAMENA 2025



Ultimate:

Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sampai dengan tahun 2025 di Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 33 Nabire – Enarotali – Wamena meliputi pembangunan infrastruktur Jalan yang meliputi Jalan Trans Papua – Lintas tengah dan juga pembangunan jalan trans papua lintas selatan. Selain jalan, Kementerian PUPR juga mendukung pembangunan pelabuhan pengumpul Nabire, pelabuhan Amamapare dan juga pelabuhan Poumako Timiki. Kementerian PUPR juga turut mendukung pembangunan Bandara Nabire, Bandara Mozes Kilangin dan juga Bandara Wamena.

Program Utama:

Program utama di WPS 33 antara lain melakukan pembangunan infrastruktur jalan, beberapa diantaranya jalan Sugapa – Enarotali, Jalan Enarotali – Sugapa, Ilaga – Sugapa, dan pembangunan jembatan Wamena – Enarotali, serta pembangunan Jalan Kenyam – Momugu.

Selain jalan terdapat pula pembangunan Rumah Layak Huni di Nabire – Kigamani – Waghete – Timika – Enarotali – Sugapa – Ilaga – Mulia – Karubaga – Tiom – Kobagma – Wamena,. Kemudian juga pembangunan rusunawa untuk pekerja pertambangan dan pendukung pertambangan di Timika,

Di bidang Sumber Daya Air terdapat beberapa pembangunan infrastruktur seperti Pembangunan Bendungan di Timika dan rehab bendungan Wamena. Untuk bidang perumahan terdapat juga perbaikan kualitas lingkungan perumahan kumuh di Pomako.

Untuk bidang keciptakaryaan terdapat pembangunan Rumah Layak Huni di Nabire – Kigamani – Waghete – Timika – Enarotali – Sugapa – Ilaga – Mulia – Karubaga – Tiom – Kobagma – Wamena, dan juga pembangunan rusunawa untuk pekerja pertambangan dan pendukung pertambangan di Timika.

Wilayah Pengembangan Strategis 34 JAYAPURA – MERAUKE

Ultimate:

Pembangunan Infrastruktur PUPR sampai dengan tahun 2025 di Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 34 Jayapura dan Merauke seperti pembangunan Jalan Trans Papua. Kementerian PUPR juga mendukung pembangunan Bandara Sentani dan pebuhan utama jayapura serta pelabuhan utama Merauke.

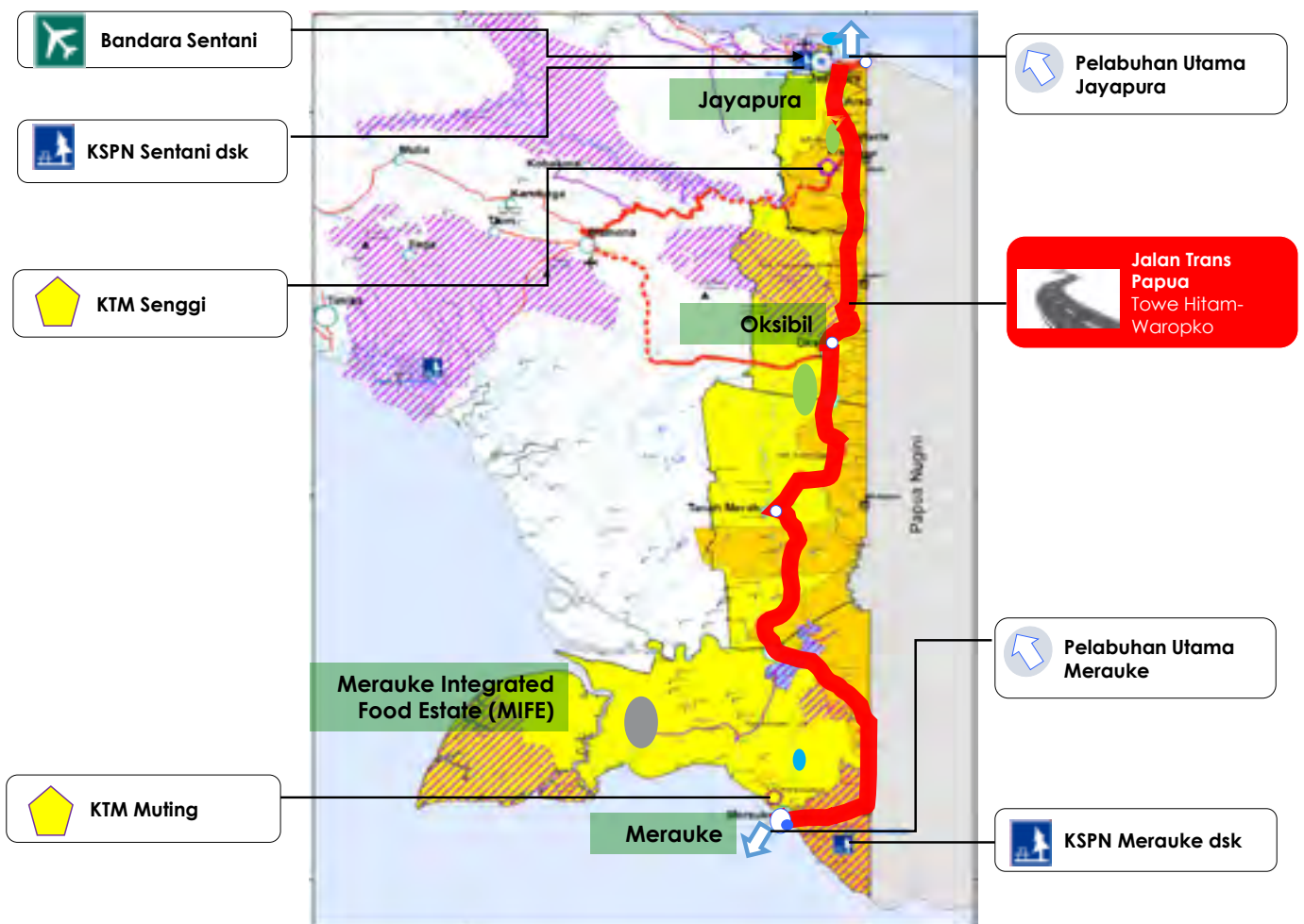
Selain itu, Kementerian PUPR juga mendukung Kawasan Terpadu Mandiri Senggi dan Muting, mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Sentani, dan juga KSPN Merauke.

Program Utama:

Program utama di WPS 34 Jayapura dan Merauke meliputi pembangunan jalan Waronko – Iwur – Oksibil, pembangunan jalan Oksibi – Dekai. Selain jalan juga ada pembangunan perumahan rakyat kota Jayapura sebanyak 200 unit dan juga penanganan perumahan adat di Kab Pegunungan Bintang 100 unit.

Di bidang Sumber Daya Air ada pembangunan daerah irigasi rawa kimam, dan juga pembangunan jaringan prasarana Air Baku Kampung Muting. Dibidang Keciptakaryaan, Kementerian PUPR turut mendukung pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Merauke dan juga Pembangunan SPAM Kota Jayapura.

ULTIMATE WPS 34 JAYAPURA-MERAUKE 2025



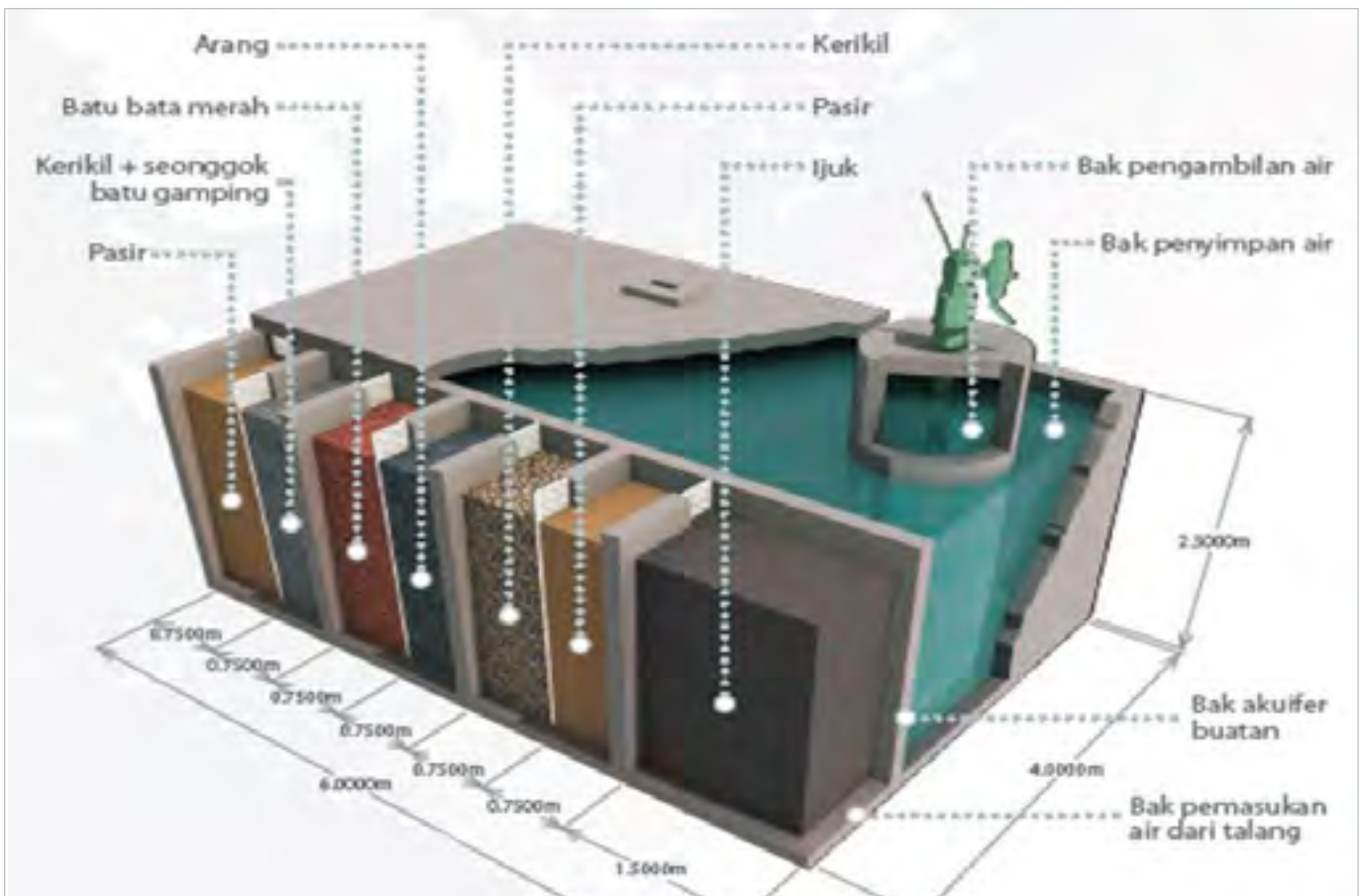
Bangunan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAAH)

Kemajuan teknologi terkait infrastruktur terus dikembangkan Kementerian PUPR melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). Salah satunya Teknologi Absah atau bangunan Akuifer buatan untuk menyimpan Air hujan. Teknologi ini dikembangkan Balitbang khususnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air (Pusair). ABSAAH merupakan bangunan konservasi dan sekaligus pendayagunaan air.

Melalui ABSAAH, air hujan tidak dibuang begitu saja, namun bisa dikelola sehingga ketersediaan air dari air hujan dapat digunakan lebih lama.

Teknologi ABSAAH berfungsi dengan cara memperbesar volume air hujan yang terkumpul dengan memperluas bangunan penangkap air hujan berupa atap bangunan. Kapasitasnya bermacam-macam, tergantung bentuk atap rumah seperti menggunakan talang air atau menggunakan satu atap yang besar seperti di Pulau Hawaii.

Dalam bangunan ABSAAH, ukuran reservoir penyimpan air hujan disesuaikan dengan perhitungan neraca hidrologi (mass curve analysis). Air kemudian dialirkan melewati batu-batuan, agar kualitas



Gambar Bangunan ABSAAH

Sumber: Balitbang PUPR



Gambar penerapan bangunan Absah di Lombok

Sumber: Balitbang PUPR

Keunggulan teknologi ini sangat cocok diterapkan untuk penyediaan air baku di daerah kering, daerah sulit air karena faktor geologi dan iklim, pulau-pulau kecil, dan daerah berair asin.

airnya lebih baik lagi. Pemanfaatan ABSAH akan membantu tersedianya air bersih dalam waktu lebih lama. Ketersediaan air sangat tergantung pada air sungai yang terkadang mengalami intrusi air laut pada musim kemarau, sehingga air tak layak dikonsumsi.

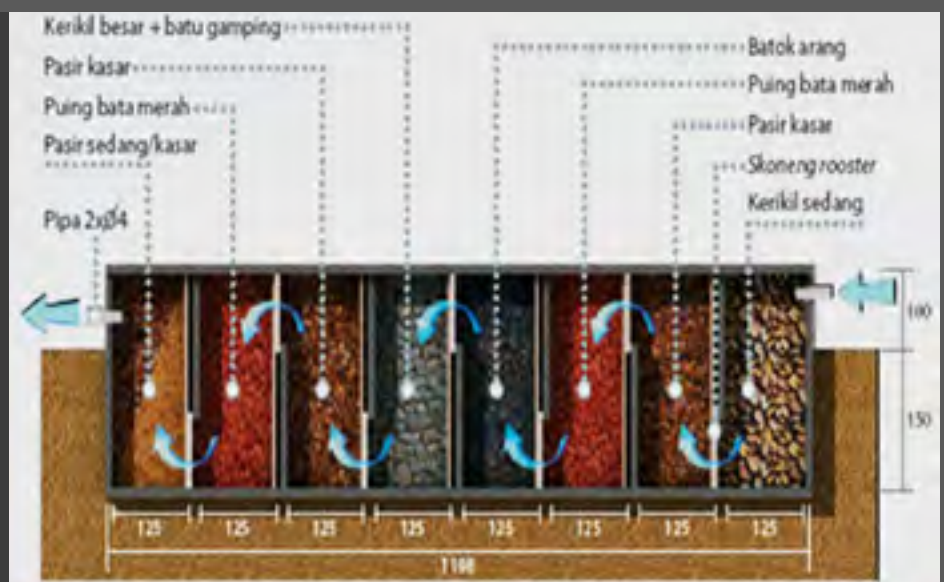
Aplikasi penggunaan ABSAH ini mulai diterapkan di masyarakat, yakni dengan uji coba di daerah Pacitan-Jawa Timur dan Bali-Kintamani. Keunggulan teknologi ini sangat cocok diterapkan untuk penyediaan air baku di daerah kering, daerah sulit air karena faktor geologi dan iklim, pulau – pulau kecil, dan daerah berair asin. Lokasi penerapan

teknologi ini berada di Pulau Miangas, Pulau Hiri, Pulau Pasi, dan Pulau Lombok.

Bangunan ini dapat menirukan aliran air yang terjadi di alam, berupa aliran air tanah alami, aliran air tanah di sekitar sumur gali atau sumur bor, aliran mata air, proses hidrologi dalam daerah aliran sungai (atap bangunan merupakan daerah aliran tangkapan hujan), proses penyaringan fisik di alam, proses penambahan mineral di alam, proses fisik, kimia dan biologi.

Sumber : Pusair, Balibang, Kementerian PUPR

Melalui ABSAH, air hujan tidak dibuang begitu saja, namun bisa dikelola sehingga ketersediaan air dari air hujan dapat digunakan lebih lama. Teknologi ABSAH berfungsi dengan cara memperbesar volume air hujan yang terkumpul dengan memperluas bangunan penangkap air hujan berupa atap bangunan.



Gambar struktur bahan penyaring air di bangunan ABSAH

Sumber: Balitbang PUPR

Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018 di Jakarta, Kamis (14/9).



Paparan capaian kinerja BPIW 2017



Jajaran BPIW



Ketua Komisi V DPR RI membacakan kesimpulan sebelum menutup RDP.



RDP dengan Komisi V DPR RI berlangsung lancar.



Kepala BPIW paparkan rencana kerja BPIW 2018 kepada Komisi V DPR RI.

Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR BPIW, Gelar Kegiatan Tim *Building*

Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melakukan kegiatan tim *building* di Bandung, beberapa waktu lalu. Kegiatan ini diharapkan mampu menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat luas.



Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Iwan Nurwanto menyampaikan harapannya



Rido Matari Ichwan ikut memberikan dukungan semangat terhadap peserta



Para peserta tim *building*



Kegiatan dinamika kelompok di lapangan



Sesi materi dalam kelas

10 Kota Pusaka Terkenal di Indonesia

Potensi aset pusaka di Indonesia bervariasi dengan memiliki karakter yang beragam, mulai dari aset bekas jajahan hingga bangunan tradisional.

Untuk melestarikan aset ini, pemerintah mencanangkan penataan dan pelestarian untuk Kota Pusaka.

Kota-kota pusaka di Indonesia, didukung pemerintah pusat secara optimal. Tujuannya tak lain untuk penataan

dan pelestarian kota-kota yang punya nilai historis tersebut. Dengan terus ditata dan dilestarikan, maka kota-kota pusaka itu dapat menjadi destinasi wisata bagi para turis dalam maupun luar negeri.

Pada serba-serbi edisi kali ini, ditampilkan 10 Kota Pusaka yang terkenal di Indonesia, lengkap dengan kekhasannya masing-masing. Berikut ulasannya:



BANDA ACEH

Banda Aceh menjadi salah satu kota pusaka yang ada di Indonesia untuk dipersiapkan menjadi *The World Heritage City*. Beberapa aset pusaka Banda Aceh yang dilestarikan antara lain: Pusaka budaya ragawi, seperti Gunongan, Masjid Raya Baiturrahman, pintu Khop Putroe Phang, makam kandang XII, makam Syiah Kuala, museum Tsunami Aceh, kerkhoff,

Pusaka budaya tak ragawi, terdiri dari Tari Rapai Geleng, Tari Seudati, tari Rateb Meuseukat, prosesi adat perkawinan, prosesi adat seumano pucok, tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, tradisi hari Meugang, tradisi Peutreun Aneuk, prosesi kenduri blang, prosesi kenduri laot, prosesi peusijuek, Hadin Maja, rencong,

Pusaka alam di Aceh antara lain, Pantai Ulee Lheue, pantai Alue naga, pantai Syiah kuala, Pantai Gampong Jawa dan pantai gampong pande, Krueng Aceh



BUKIT TINGGI

Dari sejarah yang dimiliki kota Bukit Tinggi dari waktu ke waktu merupakan rangkaian pusaka yang perlu dilestarikan. Warisan peninggalan pusaka ruang kota merupakan kekuatan aset lama yang mampu memberikan identitas kota yang terpelihara. Beberapa aset yang dimiliki oleh Kota Bukittinggi antara lain:

Di Bukit Tinggi ada beberapa pusaka budaya ragawi seperti, Rumah Gadang, Jembatan Limpapeh, Jam Gadang, Benteng *Fort De Kock*, Bangunan Sekolah Rajo, dan eks bangunan kantor Depdikbud. Kemudian juga ada Kompleks kantor Polres Agam, Enzibang5/1 Bukit barisan, kompleks kantor kodim 03/04 Agam, dan bangunan SMP 1. Tidak hanya itu, ada juga istana Bung Hatta, Cerobong asap dan Lubang Jepang.

Pusaka budaya tak ragawi, terdiri dari: tari piring dan tari payung. Untuk Pusaka Alam, yakni Lembah Ngarai Sianok.



SEMARANG

Sejarah dari kota Semarang meninggalkan jejak sejarah melalui aset pusaka seperti pusaka budaya ragawi. Pusaka jenis ini beberapa diantaranya adalah Kawasan Kota lama Semarang, Kawasan pecinan, kawasan kampung melayu, dan Kawasan jalan Petudungan. Kemudian ada juga Kawasan kampung Karangdara, Pasar Johar, Kampung Batik, Klenteng Sam Poo Kong, dan Kampung Kulitan. Disini juga ada Kawasan Tugu Muda, Kawasan Taman Diponegoro, dan Kawasan Candi Baru.

Pusaka budaya tak ragawi, terdiri dari: warak Ngendhog, Dugder Pasar Malam menjelang Ramadhan, upacara-upacara besar Klenteng Tay Kak Sie, Haul Kyai Shoeh Darat, Pasar Semawis, dan Semarang *Night Carnival*.

Pusaka Alam, terdiri dari: Pantai marina, pantai maron, Taman lele, air terjun kali pancur, curug benowo, goa kreo



YOGYAKARTA

Kota Yogyakarta merupakan sebuah kota dengan lintasan sejarah yang panjang yang menjadikan Jogjakarta sebagai salah satu kota di Indonesia yang memiliki aset yang patut untuk di lestarikan. Aset pusaka Jogjakarta antara lain :

Pusaka budaya ragawi, terdiri dari: keraton Jogjakarta, Tugu Jogjakarta, candi borobudur, candi prambanan Masjid Gedhe Kauman, Taman Sari, Museum Sonobudoyo, Masjid Mataram Kotagede, pasar kota gede, Beteng, dan Makam Hastorenggo. Kemudian ada Pasar Beringharjo dan Gedung DPRD DIY.

Pusaka budaya tak ragawi, terdiri dari: beberapa ragam tari Jawa Klasik Gaya Yogyakarta, Ketropak, dan gamelan sebagai salah satu alat tradisional Jawa. Di Yogya juga ada batik, dan pakaian adat. Kemudian Pusaka Alam, terdiri dari: Alur Sungai Winongo, Code dan Gajahwong, Pantai Parangtritis, Gua Pindul, dan Kalibiru.



TERNATE

Kota ternate terkenal dengan sejarah rempah cengkih dan pala yang menjadi incaran bangsa eropa sejak abad ke -16. kedatangan bangsa Eropa meninggalkan jejak aset pusaka . Aset pusaka yang ada di Kota Ternate terdiri dari pusaka budaya Tangible, pusaka budaya Intangible, pusaka Saujana dan pusaka Alam.

Pusaka budaya ragawi, seperti Keraton kesultanan Ternate, Benteng Kastela, dan Masjid Kesultanan Ternate.

Pusaka budaya tak ragawi, yakni pusaka upacara adat seperti Kolo Kie dan Badabus. Kemudian untuk pusaka tarian seperti tarian soya-soya, dan tarian Cakalele.

Pusaka saujana, terdiri dari: Gunung Gamalama Pusaka Alam, Batu Angus, Danau Tolire Besar, dan Danau Laguna. Selanjutnya ada Cengkeh Afo, Talaga Nita, Pantai Sulamadaha, Pantai Tobololo, dan Pantai Kastela.



BANJARMASIN

Aset pusaka yang menjadi kekayaan kota pusaka Banjarmasin sesuai dengan konsep pelestarian dan pengembangan heritage mencakup: pusaka alam, pusaka budaya dan pusaka saujana.

Pusaka budaya ragawi, terdiri dari: masjid jami, makam pangeran Antasari, museum wasaka, masjid Sultan Suriansyah, makam Surgi Mufti, makam Sultan Suriansyah, Kelenteng, Pecinan, kawasan sungai Jingah,

Pusaka budaya tak ragawi, seperti Kain Sasirangan, kesenian mamanda, lamut, dan Madihin. Kemudian ada juga musik Panting, Wayang Gung, wayang kulit, teater Abdul Muluk Cabang, teater tari topeng,

Pusaka Saujana, terdiri dari: Pasar terapung, kampung sasirangan



PALOPO

Ragam bangunan yang ada di kota Palopo, baik di tinjau dari bentuk bangunan maupun fungsi bangunan, menjadikan Palopo layak dijadikan kawasan bersejarah yang perlu dilestarikan sebagai kota pusaka. Berdasarkan identifikasi ragam pusaka yang ada di Kota Palopo antara lain:

Pusaka budaya ragawi, terdiri dari: Masjid Jami', Palopo, Lingkungan Istana Datu Luwu, Lingkungan adat Petta, Latuppa, Mungka-jang dan Benteng.

Pusaka budaya tak ragawi, terdiri dari: Upacara adat maccera tasi', tari paduppa, tradisi bunga male, ragam kuliner seperti kapurung, dange, bagea



SINGKAWANG

Aset pusaka yang menjadi kekayaan kota pusaka Singkawang antara lain: Pusaka budaya ragawi. Pusaka ini terdiri dari : Patung Naga, Vihara Tri Dharma Bumi Raya, Rumah tua Marga Xie, gereja Katedral dan Paroki. Kemudian juga ada Bioskop Singkawang, Rumah panjang Dayak, Tungku naga, dan Mesjid raya.

Untuk pusaka budaya tak ragawi adalah Pawai Patung.

Sedangkan Pusaka Alam, terdiri dari: pantai pasir pendek, pantai batu payung, Rindu Alam, Pantai Tanjung Bajau, Sink Island Park dan Pantai Pasir Panjang,



DENPASAR

Aset pusaka Denpasar Bali sangat lengkap dan kaya yang meliputi pusaka alam, pusaka budaya ragawi, pusaka tak ragawi dan pusaka saujana.

Pusaka budaya ragawi di Pulau Dewata ini seperti Puri Pemecatu, Arca Dewa Aikpala, Arca Catur Mukha, dan Pura Rambut Siwi. Kemudian ada Pura Satrya, Pura Maospahit Grengeng, dan Masjid As'huhada. Tidak hanya itu, di Denpasar juga ada Museum Bali, Pura Sakenan, Balai Kulkul Puri Pemecutan, dan Arca Dewa Indra. Tak ketinggalan ada Rudra, Kuwera, Jaya Sabha, pintu Gerbang Pasar Badung, Banjar Lelangon, dan Pura Jagatnatha.

Pusaka budaya *Intangible* (Non ragawi), terdiri dari: Subak, sekehe, omed-omedan, tenun ikat "endek", kuliner, teks "lontar", pengobatan tradisional.

Pusaka Alam, terdiri dari: pantai Sanur, Tukad Badung, Bunga jempiring, hutan mangrove, tanaman gumi Banten, dan keragaman hayati.



KUPANG

Aset pusaka yang ada di Kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini didasarkan pada aset peninggalan.

Beberapa aset yang punya nilai sejarah yang tinggi di kota ini termasuk dalam kategori Pusaka *Tangible*, seperti Tugu Jepang dan Makam Taebenu. Di Daerah ini juga terdapat beberapa aset pusat, seperti Gua dan Banker Jepang, dan Klenteng Lay.

Dengan memiliki berbagai kawasan pusaka, pemerintah daerah bersama-sama pemerintah pusat serta pihak terkait lainnya, terus melakukan berbagai upaya untuk melestarikan dan menjaga nilai sejarah dari beberapa aset pusaka yang ada tersebut.



5 Rahasia menjadi pemimpin yang bijaksana

Tidaklah mudah menjadi seorang pemimpin, terutama bagi mereka yang belum terbiasa. Jika anda dihadapkan pada keadaan harus memimpin, namun anda kesulitan dalam menjalaninya maka tips berikut ini semoga membantu permasalahan anda.

1. Mau mendengarkan masukan
seorang pemimpin yang bijaksana tentulah mau mendengarkan masukan dari siapapun, namun tetap harus dipilih mana yang akan memberikan perubahan yang signifikan kepada kebijakan tersebut.

2. Berwawasan luas
Seorang pemimpin seringkali dihadapkan pada keharusan membuat keputusan. Minimnya pengetahuan akan mengurangi kebaikan dalam keputusan yang diambil. Pemimpin yang berwawasan luas akan menjadikan dirinya lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan.

3. Buat interaksi kepada Tim
Jika anda berada didalam sebuah tim, sebisa mungkin anda pancing dan bangun interaksi agar tim tersebut menjadi solid. Tim tersebut akan saling mendukung, dan saling memberikan masukan yang baik ketika terjalin interaksi didalamnya.

4. Hapus keraguan dalam pikiran anda
Pemimpin tidak boleh memiliki keraguan dalam berfikir maupun bertindak. Jika sudah menetapkan sebuah target maka segera dilakukan dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh agar berhasil.

Anda juga harus benar-benar mengorbankan semua yang dimiliki agar semua dapat terwujud, baik pikiran, tenaga maupun interaksi kepada semua orang dalam tim.

5. Ambil waktu lebih
Jangan anda memaksakan untuk segera membuat keputusan terlalu awal jika tidak memungkinkan, sebab akan banyak dampak dari keputusan yang anda buat secara terburu-buru, mundurkan waktu pengumuman kebijakan sampai kebijakan tersebut benar-benar siap untuk disampaikan.

Obras

Bang Egi merupakan tokoh kartun dalam Obras, dan Egi juga sapaan akrab dari "Sinergi".

BANG EGI



SIKE BANG, PACE DARI MASA BANG!

HAI SEN,

TAKI ADA PERUBAHAN PERBAGASAN INTEGRATED TOURISM MASTER PLAN



APA ITU BANG?

INTEGRATED TOURISM MASTER PLAN ITU RENCANA INDIK PARAWISATA YANG DIINTEGRASIKAN ATAU DIPADUKAN

JADI MASTER PLAN PARAWISATA DARI BEBERAPA INSTANSI SEPERTI DARI KEMENTERIAN PARAWISATA DAN KEMENTERIAN PURI DESATILKAN



TUJUANNYA APA BANG?

TUJUANNYA UNTUK PENGEMBANGAN PARAWISATA, TERUTAMA DI 3 KAWASAN STRATEGIS PARAWISATA NASIONAL ATAU KSPN

YAKNI DANAU TOBA, BOROBODUR, DAN MANDALIKHA DAPAT DILAKUKAN SELURUH ASPEK, SEPERTI INFRASTRUKTUR, SOSIAL, DAN BUDAYA



PERAN BPKW SEBAGAI APA BANG?

BPKW DIPERCAYA PEMERINTAH MENGAJAL PEMBUATAN INTEGRATED TOURISM MASTER PLAN, TERMASUK PROSES LELANG INTERNASIONAL.

JERENKA DIKUTI PERUSAHAAN DALAM DAN LUAR NEGERI INI MENJADI KEBANGGAAN BUAT BPKW.



WAAA, TGP DEH BUAT BPKW!

Kartunis: Aghni Ghofarun Auliya

Tahun 2017, Fokus Penanganan Infrastruktur pada Jalan dan Pengairan

H. Muhtarom, S.Sos

Bupati Madiun

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun saat ini tengah mengencangkan pengembangan infrastruktur di wilayahnya. “Pada 2017 ini, target pembangunan infrastruktur di Kabupaten Madiun telah tercapai lebih dari 70 persen,” ujar Bupati Madiun, Muhtarom saat ditemui pers termasuk “Sinergi” di Madiun, beberapa waktu lalu.

“Pada 2017 ini, target pembangunan infrastruktur di Kabupaten Madiun telah tercapai lebih dari 70 persen,”
ujar Bupati Madiun,
H. Muhtarom, S.Sos

la mengatakan, penanganan infrastruktur tersebut meliputi perbaikan fasilitas umum serta fasilitas pemerintahan, seperti jalan, jembatan, gedung, saluran irigasi dan pembangunan fasilitas lainnya.

Penanganan infrastuktur yang disebut di Madiun lebih difokuskan pada pembangunan serta perbaikan jalan dan pengairan. Sebab, kondisi jalan maupun pengairan terutama disaluran irigasi tingkat kerusakannya hampir mencapai 50 persen lebih.

Muhtarom mengakui, untuk pembangunan serta perbaikan jalan dan pengairan banyak mendapat dukungan perintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK). Ia juga meyakini, apabila bantuan DAK terus meningkat dari tahun ke tahun akan mempercepat penyelesaian masalah jalan dan pengairan di Madiun.

Pemkab Madiun, ungkapnya, akan terus berkordinasi dengan pemerintah pusat terkait dukungan anggaran untuk penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Terkait rencana pembangunan konektivitas Selingkar Wilis, Muhtarom mengatakan, pihaknya sangat mendukung gagasan pemerintah pusat untuk pengembangan kawasan itu melalui peningkatan kualitas infrastruktur yang saling terkoneksi antardaerah di kaki Gunung Wilis.

Hadirnya pembangunan Selingkar Wilis, Muhtarom meyakini, akan mampu mendongkrak dengan cepat laju perekonomian kawasan di sekitar lereng Gunung Wilis, baik dari sektor pertanian, agropolitan, maupun pariwisata.
(Daris)



DAPATKAN BUKU

SINKRONISASI PROGRAM DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK 2018 - 2020 KETERPADUAN PENGEMBANGAN KAWASAN DENGAN INFRASTRUKTUR PUPR

DAPAT DIUNDUH DI
Google
Books



LANGKAH MENGUNDUH BUKU VIA WEBSITE:

1. Buka Link **Google** di www.books.google.com
2. Ketik "Sinkronisasi Program" pada kotak pencarian
3. Pilih Buku seperti diatas yang akan diunduh

LANGKAH MENGUNDUH BUKU VIA QR CODE:

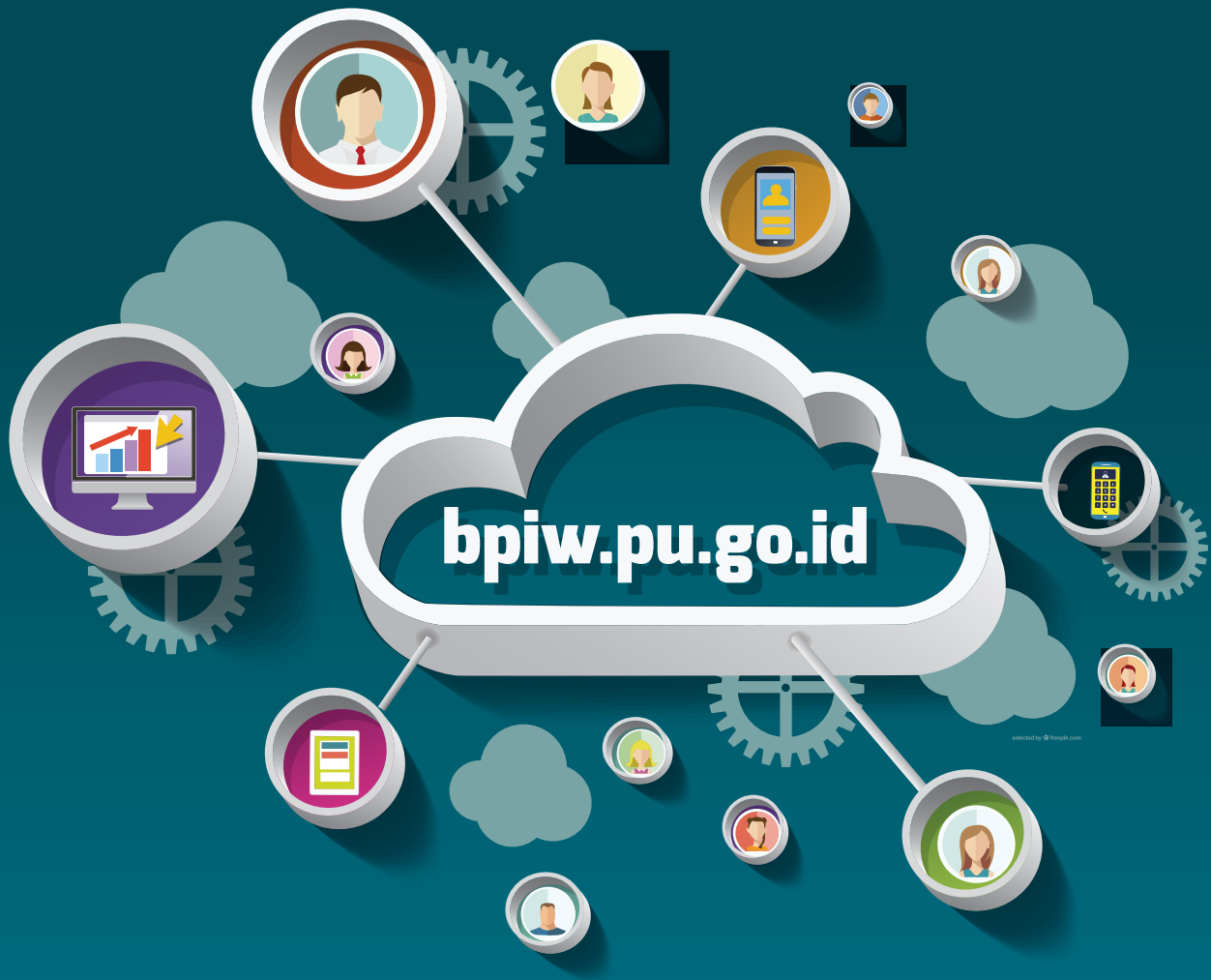
1. Buka Aplikasi Scanner Barcode pada Smartphone
2. Scan Barcode diatas dan Pilih Open Link
3. Unduh Buku



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
PUSAT PEMROGRAMAN DAN EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PUPR



BIDANG
PENYUSUNAN PROGRAM



KUNJUNGI INFO BPIW DI WEBSITE & AKUN KAMI:

 www.bpiw.pu.go.id

 @informasiBPIW

 @informasiBPIW

 Layanan Informasi BPIW

 BPIW/kementerianPUPR



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PUPR